

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

FEBRUARI 2025





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Februari 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Februari 2025

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada stakeholders di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam – Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Februari 2025 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini. Harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, Februari 2025
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Rony Widijarto P.
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	61



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	5
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	7
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	7
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	8
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
BOKS 1	11
Laporan <i>Liaison</i> Triwulan IV 2024	
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	
BOKS 2	13
Tantangan Kawasan Industri Di Batam Dalam Menghadapi Singapura-Johor Special Economic Zone (SJ-SEZ)	
BOKS 3	15
<i>Harga Gas Industri Naik, Industri Tetap Optimis</i>	

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	17
2.1 REALISASI PENDAPATAN	19
2.2 REALISASI BELANJA	20
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	22

Bab III	
Perkembangan Inflasi	25
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	27
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA	28
3.2.1 Inflasi Kota Batam	28
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	28
3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun	29
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	29
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	30

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	31
4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	33
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	33
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	34
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	34
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	36
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	36
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	36
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	37
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	38



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	39
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	41
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	41
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	42
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	42
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	42
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	42
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	43
5.2.4	Perkembangan QRIS	43
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	44
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	45
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	45
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	46
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	46
5.3.2	Perkembangan Transaksi PJP LR	46
5.3.3	Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	47

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan 49

6.1	KETENAGAKERJAAN	51
6.1.1	Ketenagakerjaan	51
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	52
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	52
6.2.2	Kemiskinan	53
6.2.3	Gini Ratio (GR)	53
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	54

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah 55

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	57
7.2	PROSPEK INFLASI	58
7.3	REKOMENDASI	58

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel B1.1	<i>Likert Scale</i> Tahun 2023 s.d 2024 di Kepri	11
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024	20
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024	21
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	22
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	23
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	27
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Desember 2024	27
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Provinsi Kepri Desember 2024	27
Tabel 3.4	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	28
Tabel 3.5	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	29
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	33
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	36
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	38
Tabel 5.1	Penyaluran PKH Tahap 4 tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri	45
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	51
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	51
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	52
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	52
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	54
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	54
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024	58
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2024	58

Daftar Gambar

Gambar B2.1 Rancangan Singapura-Johor Special Economic Zone

14

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4
Grafik 1.4	Kredit Konsumsi	4
Grafik 1.5	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	4
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	4
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	5
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5
Grafik 1.9	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5
Grafik 1.10	SBT Investasi	5
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	5
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	6
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Produk Mesin	6
Grafik 1.14	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik	6
Grafik 1.15	Perkembangan Impor	6
Grafik 1.16	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	6
Grafik 1.17	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	7
Grafik 1.18	Konsumsi Listrik Industri	8
Grafik 1.19	SBT Industri Pengolahan	8
Grafik 1.20	Kredit Sektor Konstruksi	8
Grafik 1.21	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8
Grafik 1.22	Survei Penjualan Eceran (SPE)	8
Grafik 1.23	Survei Konsumen	9
Grafik 1.24	Perkembangan Ekspor Migas	9
Grafik B1.1	LS Penjualan Domestik dan Pertumbuhan IKK & IEK Survei Konsumen	12
Grafik B1.2	Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik	12
Grafik B3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024	15
Grafik B3.2	PDRB dan Andil Industri di Kepri (% yoy)	16
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024	19
Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024	19
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	20
Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2024	21
Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2024	21
Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	22
Grafik 3.1	Inflasi Triwulan IV 2024 Regional Sumatera (% yoy)	27
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau dan Nasional Triwulan IV 2024 (% yoy)	27
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	28
Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	34
Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	34
Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	34
Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	34
Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	34
Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	35
Grafik 4.9	Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air	35
Grafik 4.10	Kredit Sektor Industri Pengolahan	35
Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	36
Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	36
Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	36
Grafik 4.14	Survei Ekspektasi Konsumen	37
Grafik 4.15	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	37
Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	37
Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	37
Grafik 4.18	DPK Perseorangan	37
Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	37

Daftar Grafik

Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	38
Grafik 5.1	Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri	41
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow	41
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	42
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	42
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	42
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	43
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	43
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	43
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	43
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.11	Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha	44
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi KUPVA	46
Grafik 5.15	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	46
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	46
Grafik 5.17	Jumlah Pengaduan	47
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	52
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	52
Grafik 6.3	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	53
Grafik 6.4	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	53
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	54
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 7.3	Likert Scale Perkiraan Penjualan Ekspor	57
Grafik 7.4	Likert Scale Perkiraan Investasi	57

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh 5,14% (yoy), lebih baik triwulan sebelumnya yakni 5,01% (yoy)

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang mencapai 4,60% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor. Di sisi LU, pertumbuhan ekonomi didukung terutama oleh LU Industri Pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan IV 2024 tercatat melandai dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan IV 2024 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 2,09%, lebih rendah dibanding triwulan III 2024

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,53% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kelompok pendidikan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan IV 2024 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tetap terjaga dan tumbuh positif dibanding triwulan sebelumnya

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara risiko kredit sektor rumah tangga meningkat. Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tetap kuat, tercermin dari jumlah kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan diikuti risiko kredit yang tetap terkendali.

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

Prospek perekonomian global diperkirakan tetap tumbuh stabil, meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tetap kuat diindikasikan dapat menjadi faktor pendorong perekonomian global. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Namun, transaksi non tunai tercatat mengalami akselerasi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Perekonomian global diperkirakan tetap stabil. Sejalan dengan pertumbuhan global, Indonesia masih tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi

Tekanan inflasi pada tahun 2025 tetap terjaga yang didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan sinergi TPID dan GNPIP.

BAB I

Perkembangan Ekonomi Prov. Kepulauan Riau

Pertumbuhan Ekonomi



5,14%

Tw IV 2024

5,01%

Tw III 2024

Konsumsi RT



2,97%

Tw IV 2024

5,10%

Tw III 2024

Investasi



5,63%

Tw IV 2024

3,22%

Tw III 2024

Net Ekspor



30,17%

Tw IV 2024

17,47%

Tw III 2024

Konsumsi Pemerintah



-7,80%

Tw IV 2024

5,39%

Tw III 2024

Industri Pengolahan



6,64%

Tw IV 2024

7,76%

Tw III 2024

Perdagangan



10,66%

Tw IV 2024

4,84%

Tw III 2024

Pertambangan



7,43%

Tw IV 2024

-5,01%

Tw III 2024

Konstruksi



1,02%

Tw IV 2024

2,06%

Tw III 2024

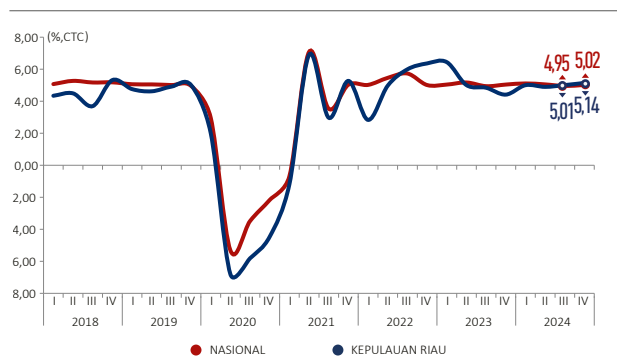
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,60% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan komponen Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp53.394,49 miliar atau tumbuh 5,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan IV 2024 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,60% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Jambi, Lampung, dan Kepri masing-masing sebesar 6,00% (yoy), 5,32% (yoy), dan 5,14% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan IV 2024 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,42% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,48%), Riau (22,97%), Sumatera Selatan (13,42%) dan Lampung (9,65%).



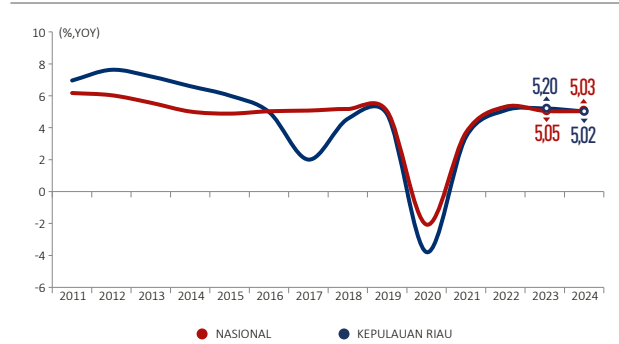
Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% , qta)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (% , qta)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% , cta)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (% , cta)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)			
1	Aceh	5,17	▼	4,15	2,06	▲	6,11	4,85	▼	4,66	5,19
2	Sumatera Utara	5,20	▼	5,10	2,25	▼	0,44	5,01	▲	5,03	23,48
3	Sumatera Barat	4,33	▼	4,04	0,46	▲	2,03	4,48	▼	4,36	6,78
4	Riau	3,46	▲	3,52	3,17	▼	0,16	3,53	▼	3,52	22,97
5	Jambi	4,01	▲	6,00	2,36	▼	0,89	4,00	▲	4,51	6,70
6	Sumatera Selatan	5,04	▲	5,07	2,47	▼	-1,85	5,02	▲	5,03	13,42
7	Bengkulu	4,57	▼	4,55	-2,56	▲	3,11	4,64	▼	4,62	2,14
8	Lampung	4,81	▲	5,32	0,75	▼	-3,52	4,33	▲	4,57	9,65
9	Kep. Bangka Belitung	0,13	▲	0,94	-0,86	▲	3,48	0,71	▲	0,77	2,24
10	Kepulauan Riau	5,01	▲	5,14	0,53	▲	6,94	4,98	▲	5,02	7,42
SUMATERA		4,48	▲	4,60	1,88	▼	0,70	4,40	▲	4,45	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 44,42%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,23% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi sejalan dengan momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta sejumlah cuti bersama.

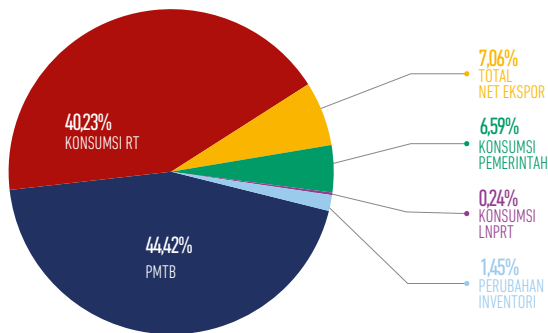
Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 7,06%, sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,59% didorong pengeluaran pemerintah dalam rangka pemilu dan pilkada.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2022					2023					2024					ARAH TW	ARAH TAHUNAN
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Konsumsi RT	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	2,97	4,51	▼	▲
2. Konsumsi LNPRT	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	▼	▲
3. Konsumsi Pemerintah	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	▼	▼
4. PMTB (Investasi)	1,18	1,89	3,94	9,01	4,03	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	▲	▼
5. Perubahan Inventori	-47,94	-39,53	35,05	-1.324,22	433,24	212,70	718,19	-42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-45,09	-35,95	▲	▼
6. Total Net Ekspor	13,64	18,30	9,01	-8,95	7,26	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	2,02	-20,48	17,47	30,17	4,68	▲	▲
a. Total Ekspor	10,37	13,48	15,05	5,73	11,09	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	▲	▲
b. Total Impor	10,00	13,00	15,61	7,39	11,49	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	▲	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,83	4,97	5,99	6,36	5,06	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	▲	▼

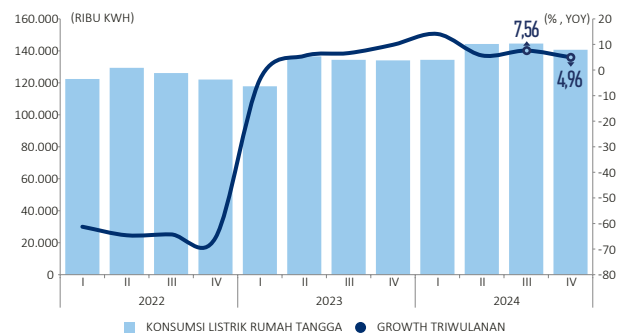
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

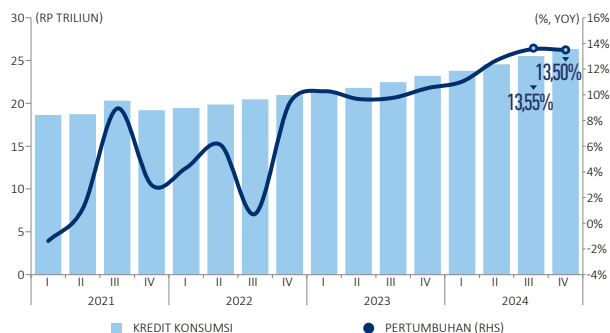


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh sebesar 2,97% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,10% (yoy). Deselerasi konsumsi rumah tangga tecermin dari kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 13,50% (yoy), melambat dibanding dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Penurunan konsumsi RT ini juga sejalan dengan konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh melambat sebesar 4,96% (yoy) di triwulan IV 2024, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 7,56% (yoy).

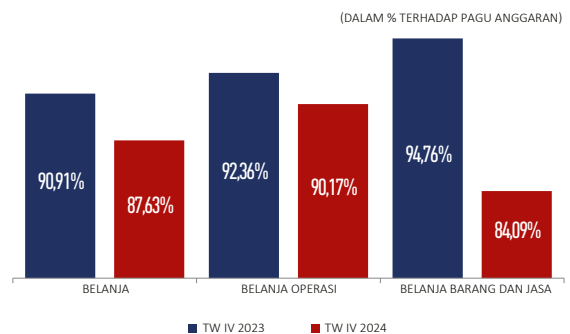


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.4 Kredit Konsumsi

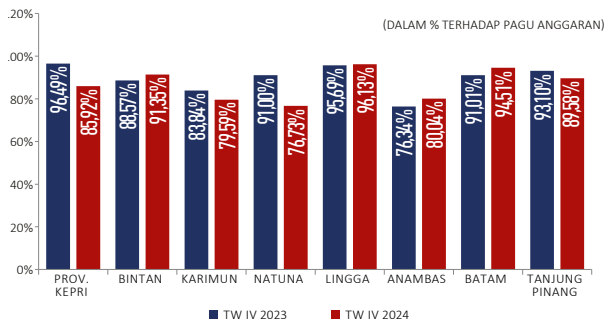
1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 7,08% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan menurunnya total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan IV 2024 hanya sebesar 87,63% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 90,91%.



Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD



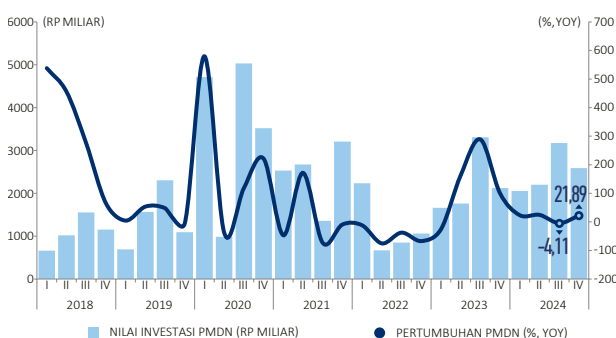
Sumber : BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri

Secara spasial, empat Pemda (Provinsi Kepri, Kab. Karimun, Kab. Natuna, dan Kota Tanjungpinang) mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan IV 2024. Realisasi belanja keempat Pemda tersebut menurun masing-masing Provinsi Kepri dari 96,49% menjadi sebesar 85,92%, Kab. Karimun dari 83,84% menjadi 79,59%, Kab. Natuna dari 91,00% menjadi 76,73%, serta Kota Tanjungpinang dari 93,10% menjadi 89,58%. Sementara itu, empat Pemda lainnya mengalami peningkatan realisasi belanja yakni Kab. Bintan dari 88,57% menjadi 91,35%, Kab. Lingga dari 95,69% menjadi 96,13%, Kab. Anambas dari 76,34% menjadi 80,02%, serta Kota Batam dari 91,01% menjadi 94,29%.

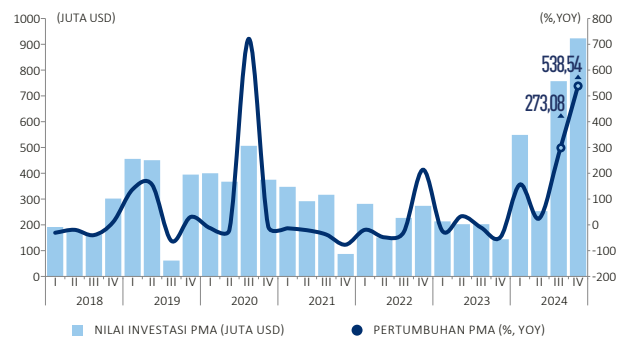
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,22% (yoy). Akselerasi tersebut terkonfirmasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kepri yang tumbuh sebesar 21,89% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,11% (yoy). Peningkatan investasi juga tercermin dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh signifikan sebesar 538,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 273,08% (yoy), seiring dengan masuknya investasi asing khususnya pada sejumlah kawasan industri di Kepri, salah satunya di Kawasan Industri Wiraradja Batam. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia untuk komponen investasi yang tumbuh dari -0,59% menjadi 5,22%.



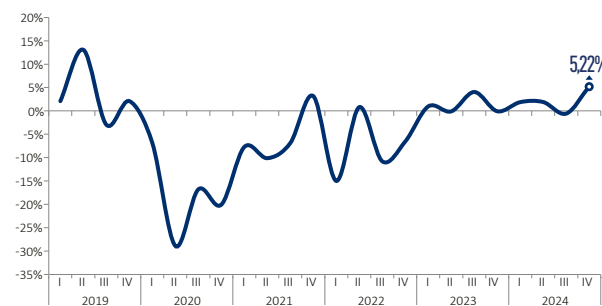
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber : BKPM (data diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

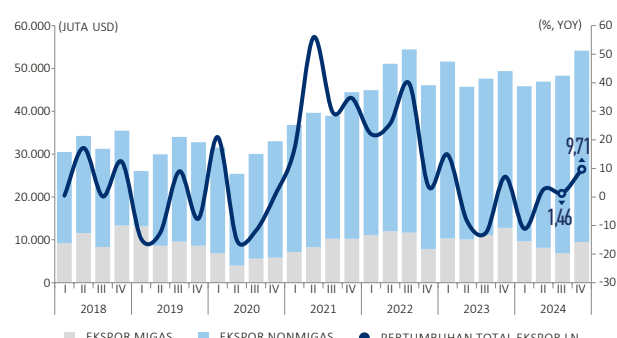


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.10 SBT Investasi

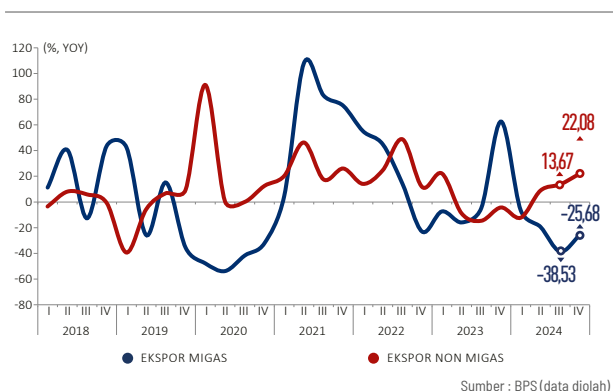
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Import

Kinerja eksternal Provinsi Kepri sebagaimana tercermin dari Net Ekspor tumbuh sebesar 30,17% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mencapai 17,47% (yoy). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ekspor tumbuh sebesar 14,85% (yoy), atau terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,25% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 13,63% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,26% (yoy). Ekspor yang terakselerasi sejalan dengan nilai total ekspor ke luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 9,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,46% (yoy).



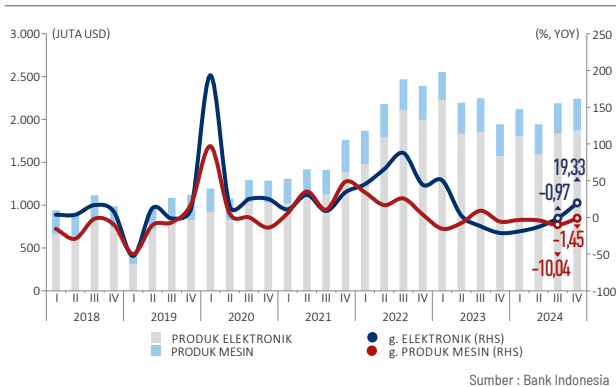
Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri

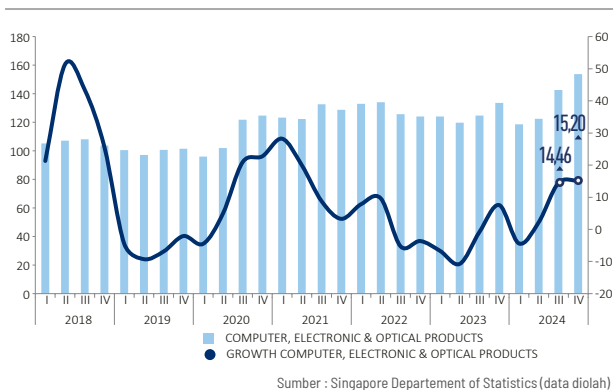


Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terakselerasi sejalan dengan meningkatnya ekspor produk elektronik dan produk mesin. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 19,33% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,97% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan perubahan *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk produk komputer, elektronik, dan optik yang pada triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 15,20% (yoy), meningkat dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,46% (yoy). Adapun nominal ekspor produk mesin mengalami perbaikan, dari terkontraksi sebesar 10,04% (yoy) menjadi kontraksi 1,45% (yoy).



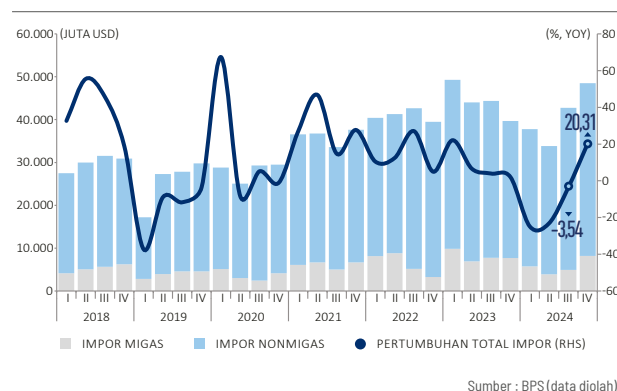
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Produk Mesin



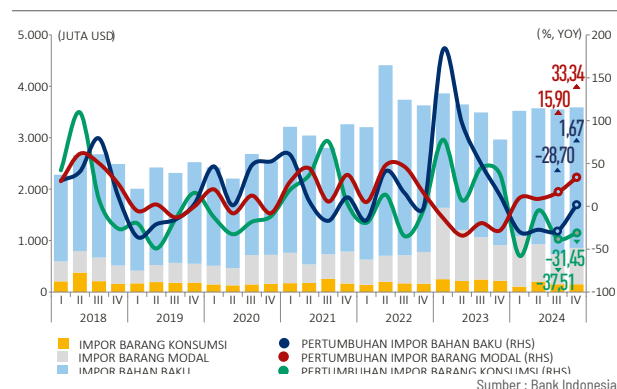
Grafik 1.14 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik

Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor secara total yang meningkat, komponen impor juga tercatat mengalami akselerasi.

Total impor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 13,63% (yoy), meningkat setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,26% (yoy). Selanjutnya, total nilai impor luar negeri juga tumbuh sebesar 20,31% (yoy) pada triwulan IV, tercatat lebih baik dari sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,54% (yoy). Meningkatnya impor luar negeri terutama disebabkan oleh peningkatan impor bahan baku. Nilai impor bahan baku dari luar negeri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 33,34% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,90% (yoy). Selanjutnya, impor barang modal juga mengalami peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,67% (yoy) setelah pada periode sebelumnya terkontraksi sebesar 28,70% (yoy). Di sisi lain, impor barang konsumsi masih mengalami kontraksi sebesar 31,45% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.



Grafik 1.15 Perkembangan Impor

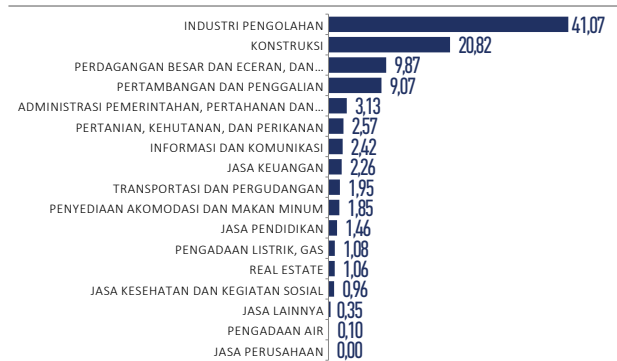


Grafik 1.16 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang tetap baik serta kinerja sektor perdagangan yang meningkat pada triwulan IV 2024 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Konstruksi.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,07%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,82%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 9,87% dan 9,07%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Adapun kinerja LU Pertambangan dan Penggalian menunjukkan perbaikan sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran terakselerasi sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat di HBKN Natal dan Tahun Baru.



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.17 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

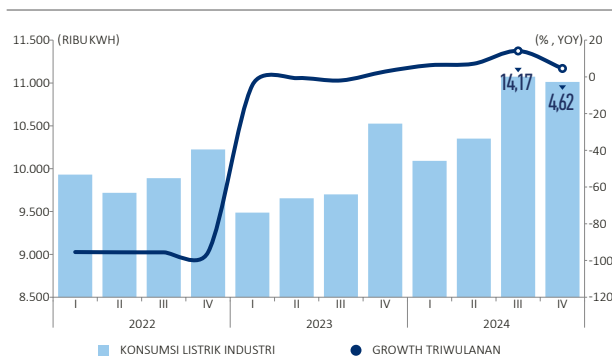
LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh tinggi sebesar 6,64% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,76% (yoy) dan memberikan andil 2,73% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang melambat tecermin dari data konsumsi listrik pada sektor industri yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,17% (yoy). Meskipun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan yang masih tumbuh cukup tinggi turut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut, dari berkontraksi 3,52% (yoy) pada triwulan III menjadi tumbuh 17,90% (yoy) di triwulan IV.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

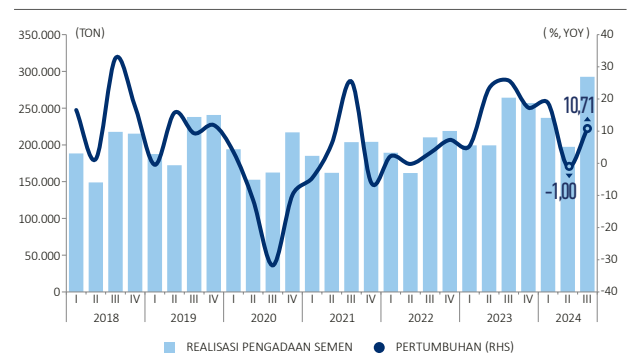
PDRB Sisi Lapangan Usaha	2022					2023					2024					ARAH TW	ARAH TAHUNAN
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,00	5,82	4,63	7,41	5,26	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	▲	▼
Pertambangan dan Penggalian	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	▲	▼
Industri Pengolahan	4,16	2,23	4,82	6,68	4,51	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	▼	▲
Pengadaan Listrik, Gas	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	▲	▼
Pengadaan Air	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	▲	▼
Konstruksi	0,69	-0,61	2,30	17,32	5,00	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	▼	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,19	22,06	7,76	7,40	13,86	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	▲	▼
Transportasi dan Pergudangan	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	▲	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	▼	▼
Informasi dan Komunikasi	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	▼	▼
Jasa Keuangan	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	▼	▼
Real Estate	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	▼	▲
Jasa Perusahaan	4,33	8,11	23,59	23,83	15,18	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	▲	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	▼	▲
Jasa Pendidikan	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	▲	▲
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	▼	▲
Jasa lainnya	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	▼	▼
PERTUMBUHAN PDRB	2,83	4,97	5,99	6,36	5,06	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	▲	▼

▲ Menguat
▼ Melambat

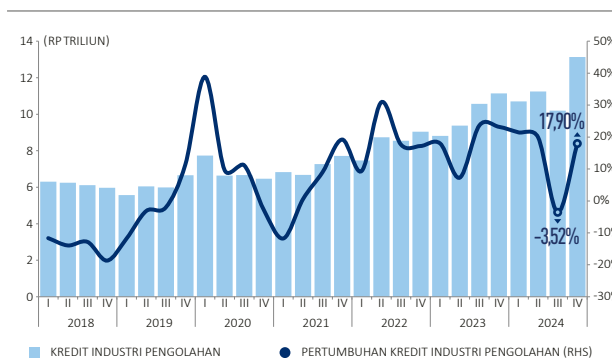
Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 1.18 Konsumsi Listrik Industri



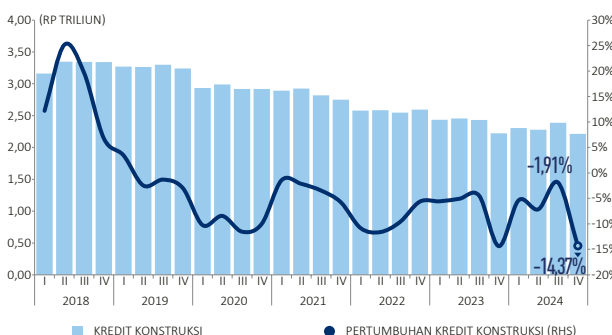
Grafik 1.21 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



Grafik 1.19 SBT Industri Pengolahan

1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 1,02% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,06% (yoy). Perlambatan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit pada sektor tersebut di Provinsi Kepri yang mengalami kontraksi sebesar 14,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 1,91% (yoy). Di sisi lain, perlambatan

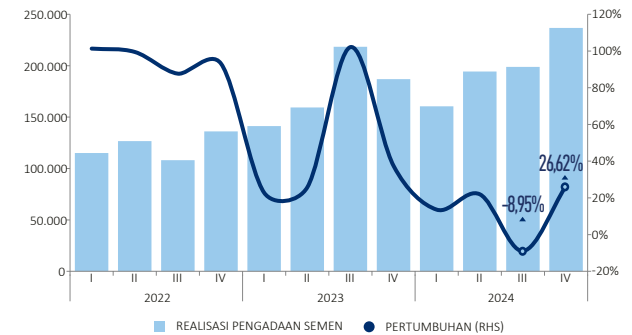


Grafik 1.20 Kredit Sektor Konstruksi

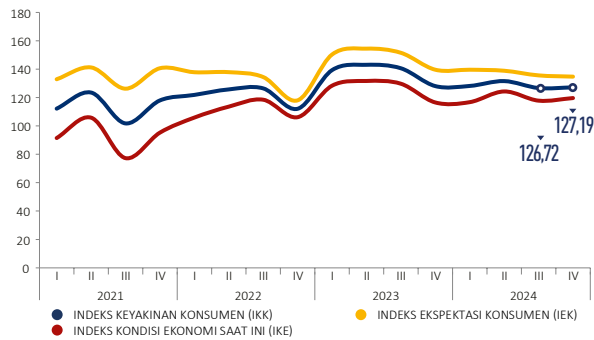
yang lebih dalam masih tertahan yang diindikasikan oleh realisasi pengadaan/penjualan semen yang masih tumbuh sebesar 19,91% (yoy). Meskipun melambat, LU Konstruksi tetap menjadi salah satu sektor yang memberikan andil tertinggi terhadap PDRB Kepri yaitu sebesar 0,21%. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri.

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Akselerasi tersebut tecermin dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan omzet dari terkontraksi 8,95% (yoy) pada triwulan III menjadi tumbuh 26,62% (yoy) di triwulan IV. Selain itu, Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat dari 126,72 menjadi 127,19. Hal ini menunjukkan perbaikan optimisme masyarakat terhadap perekonomian dan mendorong *spending* yang lebih tinggi sehingga turut mendukung kinerja LU Perdagangan.



Grafik 1.22 Survei Penjualan Eceran (SPE)

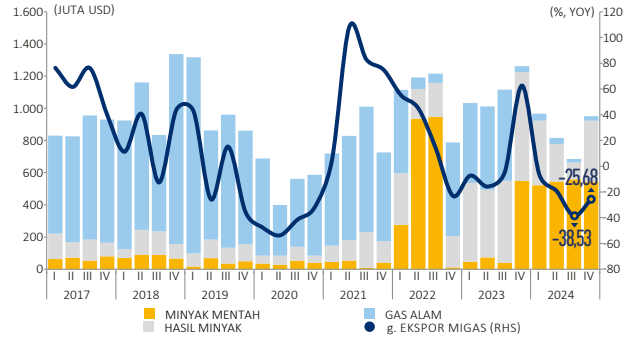


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.23 Survei Konsumen

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan

Pada triwulan IV 2024 kinerja LU Pertambangan dan Pengalihan tumbuh sebesar 7,43% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,01% (yoy). Kinerja LU Pertambangan mulai meningkat sejalan dengan adanya sejumlah



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.24 Perkembangan Ekspor Migas

proyek migas yang baru mulai beroperasi. Hal ini tecermin dari membaiknya perkembangan ekspor migas pada triwulan IV 2024, walaupun masih mengalami kontraksi sebesar 25,68% (yoy) namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam yakni sebesar 38,53% (yoy).



BOKS 1

Laporan *Liaison* Triwulan IV 2024 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

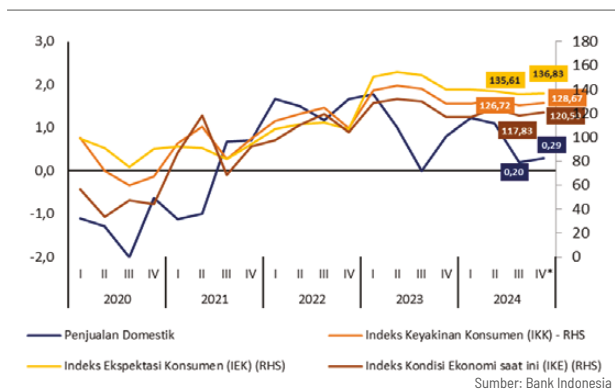
Untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan wawancara kegiatan dunia usaha atau *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus *liaison* pada triwulan IV tahun 2024 terdiri dari Industri Pengolahan (58,3%), Pengadaan Listrik dan Gas (8,3%), Pertambangan dan Penggalian (8,3%), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (8,3%), serta Jasa Lainnya (16,7%). Ruang lingkup analisa laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis dimasa yang akan datang dengan ringkasan nilai *likert* sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel B1.1 *Likert Scale* Tahun 2023 s.d 2024 di Kepri

INDIKATOR	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KONDISI SAAT INI								
Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20	0,29
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60	0,45
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45	-0,17
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33	-0,40
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58	0,67
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46	0,38
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15	0,09
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00	2,00
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31	0,50
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58	-0,08
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23	0,33
PERKIRAAN KE DEPAN								
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08	0,92
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50	0,18
Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46	0,33
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82	0,83

Berdasarkan hasil *liaison* triwulan IV 2024, produksi dan penjualan domestik mengalami peningkatan tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,29, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,20. Secara umum, kinerja penjualan/produksi domestik di wilayah Kepri meningkat pada sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Penjualan/produksi pada sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan disebabkan oleh banyaknya permintaan dari dalam negeri terutama untuk produk *cocoa cake* dan *cocoa powder*. Peningkatan permintaan yang cukup signifikan terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya khususnya jasa pengelola kawasan karena penambahan jumlah kunjungan wisatawan lokal serta peningkatan penggunaan ruangan rapat dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara itu, peningkatan kinerja penjualan domestik pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas ditopang oleh munculnya bisnis *data center* yang mendorong penggunaan listrik di Batam serta penambahan konsumen yang cukup tinggi di tahun 2024. Penguatan kinerja domestik ini juga terkonfirmasi dari pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. IKK mengalami peningkatan pada triwulan IV 2024 sebesar 128,67, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 126,72. Sejalan dengan IKK, nilai pertumbuhan IKE pada triwulan IV 2024 juga mengalami kenaikan dari 117,83 menjadi 120,50 (Grafik 1).

Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor mengalami peningkatan tercermin dari nilai *likert scale* yang meningkat menjadi 0,45 pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,60. Kinerja ekspor yang meningkat ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Seperti kondisi penjualan domestik, peningkatan kinerja ekspor pada Industri Pengolahan disebabkan oleh meningkatnya *demand* global khususnya produk *cocoa butter*, kapasitor, serta bertambahnya proyek untuk pengerjaan konstruksi lepas pantai. Selain itu, terdapat peningkatan permintaan dari *customer* produk kapasitor untuk video, audio dan navigasi sehingga perusahaan berfokus pada pengembangan kapasitor untuk produk *high grade*. Peningkatan kinerja ekspor cukup drastis terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian ditopang oleh tingginya permintaan ekspor produk *dust* ke Singapura. Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, peningkatan dipengaruhi



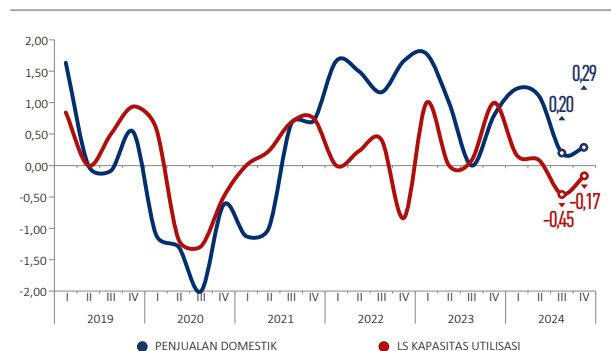
Grafik B1.1 LS Penjualan Domestik dan Pertumbuhan IKK & IEK Survei Konsumen

oleh bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam meskipun tidak terlalu signifikan dikarenakan kebijakan pemerintah terkait VoA yang dinilai cukup memberatkan bagi wisatawan.

Tingkat kapasitas utilisasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efisiensi operasi. Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat meningkat dari periode sebelumnya tercermin dari *likert scale* kapasitas utilisasi yang meningkat menjadi -0,17 dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,45. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan domestik dan ekspor pada triwulan IV 2024 tercermin dari *likert scale* yang mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2). Peningkatan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya.

Tingkat persediaan mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2024. Level persediaan yang menurun tersebut terjadi seiring dengan peningkatan kinerja penjualan domestik dan ekspor khususnya sektor Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian dengan penggunaan persediaan perusahaan yang ada untuk pemenuhan produksi. Sementara itu, penurunan ini juga dipengaruhi oleh *lead time* pengiriman beberapa jenis bahan baku yang memakan waktu cukup lama serta target perusahaan terhadap pengurangan biaya penyimpanan sehingga perusahaan tidak melakukan *buffering* bahan baku dalam jumlah besar. Pada sektor Pertambangan dan Penggalian, persediaan mengalami penurunan drastis dikarenakan masih dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga produksi belum kembali berjalan normal sehingga pemenuhan permintaan diambil dari sisa stok yang ada.

Secara umum, investasi pada periode ini mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya terutama pada sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Menguatnya investasi pada periode ini seiring dengan kinerja penjualan yang turut meningkat. Perusahaan melakukan penambahan lini produksi, mesin, dan melakukan renovasi bangunan. Peningkatan investasi juga sejalan dengan peningkatan kapasitas utilisasi yang menyebabkan perusahaan melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti mesin dan bangunan.



Grafik B1.2 Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik

Harga jual pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan harga jual/tarif terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Meningkatnya harga jual pada sektor-sektor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tren harga pasar dan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan induk. Pada sektor jasa lainnya khususnya penyedia jasa penyimpanan minyak bumi, kenaikan harga jual didorong oleh *business improvement* yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan komposisi *clean oil*.

Penetapan harga jual pada umumnya dilakukan dengan menerapkan *cost plus margin* bagi beberapa perusahaan di sektor industri pengolahan, yang berarti margin yang diperoleh dihitung berdasarkan biaya produksi yang timbul. Margin turut mengalami peningkatan dipengaruhi oleh peningkatan kinerja penjualan dan kenaikan jumlah *tenant* yang bergabung bagi perusahaan penyedia jasa pengelolaan kawasan. Kenaikan margin juga merupakan hasil dari usaha perusahaan melakukan negosiasi kepada pemasok untuk dapat menurunkan biaya bahan baku. Secara umum, variabel biaya mengalami penurunan baik pada komponen biaya energi maupun biaya bahan baku. Komponen biaya energi mengalami penurunan terutama pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Jasa Lainnya dikarenakan berkurangnya pemakaian energi seperti listrik dan solar sebagai dampak dari penghematan penggunaan energi serta peralihan ke penggunaan energi ramah lingkungan. Komponen biaya bahan baku turut mengalami penurunan terutama pada sektor Industri Pengolahan disebabkan oleh efisiensi pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran dan memanfaatkan persediaan yang tersisa. Sementara itu, biaya tenaga kerja relatif stabil seiring dengan besaran kenaikan tingkat Upah Minimum Kota (UMK).

Sejalan dengan kondisi kinerja penjualan domestik dan ekspor, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan khususnya terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Beberapa perusahaan melakukan penambahan tenaga kerja seiring dengan kinerja produksi dan penjualan yang meningkat serta bertambahnya jumlah proyek yang sedang digarap baik domestik maupun ekspor.

BOKS 2

Tantangan Kawasan Industri Di Batam Dalam Menghadapi Singapura-Johor Special Economic Zone (SJ-SEZ)

Batam merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Beberapa kawasan industri yang berlokasi di Batam diantaranya Batamindo Industrial Park, Kabil Industrial Estate, dan Sekupang Industrial Estate. Dengan status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*), Batam menawarkan berbagai kemudahan bagi para investor, seperti insentif pajak dan regulasi yang mendukung dunia usaha. Lokasinya yang hanya berjarak sekitar 20 km dari Singapura menjadikannya pilihan ideal bagi perusahaan yang ingin mengakses pasar internasional dengan biaya lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga

Namun, kehadiran *Singapura-Johor Special Economic Zone (SJ SEZ)* membawa tantangan baru bagi Batam. SJ-SEZ merupakan kawasan ekonomi khusus yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Singapura dan Johor, Malaysia. Kawasan ini mencakup berbagai zona unggulan (*flagship zones*) yang masing-masing memiliki sektor prioritas yang ditargetkan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing kawasan. Terdapat tiga proposal baru untuk *flagship zone* dalam SJ-SEZ, yaitu Forest City, Pengerang Integrated Petroleum Complex atau PIPC, dan Desaru. Ketiga zona ini menawarkan insentif khusus bagi industri terkait dan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

SJ-SEZ menargetkan beberapa sektor prioritas baru, seperti industri kedirgantaraan (*aerospace*), elektronik dan kelistrikan (*electrical & electronics*), kimia (*chemical*), perangkat medis (*medical devices*), dan farmasi (*pharmaceuticals*). Sektor-sektor ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi dan meningkatkan daya saing Johor sebagai hub industri di Asia Tenggara. Selain itu, setiap *flagship zone* dalam SJ-SEZ memiliki fokus industri yang berbeda sebagai berikut:

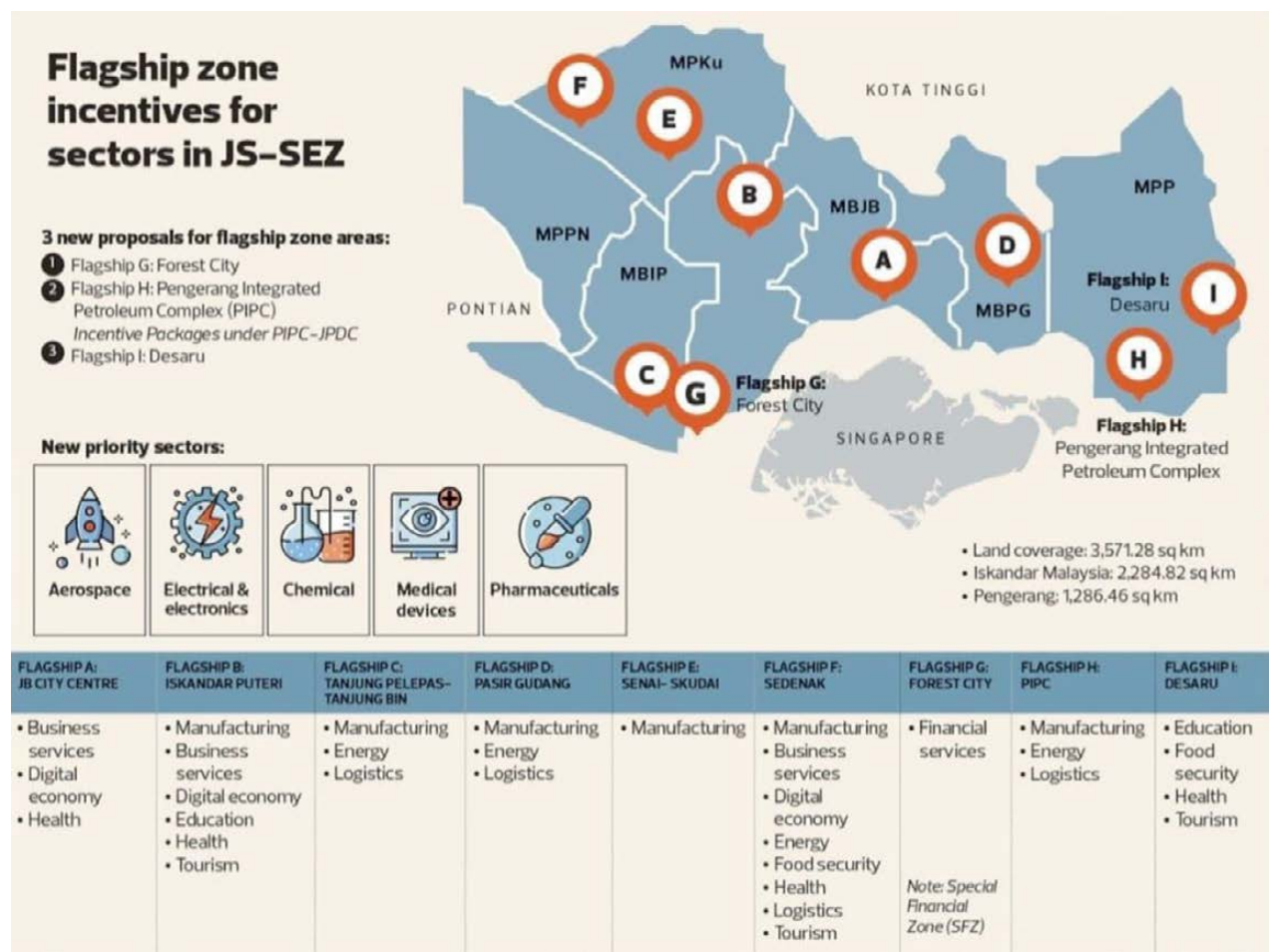
- Flagship A (Johor Bahru City Centre) menitikberatkan pada pengembangan bisnis, jasa keuangan, digital, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata;
- Flagship B (Iskandar Puteri) lebih berorientasi pada manufaktur, jasa keuangan, digital, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata;
- Flagship C (Tanjung Pelepas-Tanjung Bin) serta Flagship D (Pasar Gudang) berfokus pada industri manufaktur, energi, dan logistik, yang memainkan peran penting dalam rantai pasok global;
- Flagship E (Senai-Skudai) menonjol dalam industri manufaktur, energi, ketahanan pangan, kesehatan, logistik, dan pariwisata;

- Flagship F (Sedanak) memiliki potensi dalam sektor jasa keuangan, bisnis, energi, ketahanan pangan, kesehatan, logistik, dan pariwisata;
- Flagship G (Forest City) diproyeksikan sebagai pusat jasa keuangan dengan daya tarik investasi yang lebih besar;
- Flagship H (PIPC) ditujukan untuk industri minyak dan gas;
- Flagship I (Desaru) lebih menitikberatkan pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, kawasan SJ-SEZ memiliki cakupan lahan seluas 3.571,28 km², dengan wilayah Iskandar Malaysia meliputi 2.284,82 km² dan Pengerang mencakup 1.286,46 km². Dengan adanya SJ-SEZ, Johor dan Singapura semakin terintegrasi dalam ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Insentif investasi dan keberagaman sektor industri yang dikembangkan di kawasan ini berpotensi meningkatkan daya saing kawasan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Johor dan Singapura sebagai pusat ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran JS-SEZ disatu sisi menjadi tantangan bagi pengembangan investasi di Batam. Hal ini mengingat keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia maupun Singapura dibandingkan dengan Batam, atau Indonesia secara keseluruhan. Secara spesifik, SJ-SEZ akan menarik minat investor karena alasan sebagai berikut:

- a. Daya Saing Regulasi dan Insentif.** Meskipun Batam menawarkan insentif pajak, SJ SEZ juga menawarkan kebijakan yang sangat menarik bagi investor. Perusahaan yang melakukan investasi baru dalam aktivitas manufaktur dan jasa yang memenuhi syarat, seperti rantai pasok kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, perangkat medis, dan manufaktur kedirgantaraan, dapat menikmati tarif pajak khusus sebesar 5% hingga 20 tahun. Sementara kalau dibandingkan, PPh industri di Indonesia mencapai 21%. JS SEZ juga menyediakan *Industrial Building Allowance* sebesar 10%, yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, JS SEZ juga menawarkan tarif pajak khusus untuk pekerja berpendidikan. Pekerja berpendidikan yang memenuhi syarat di JS-SEZ ditawarkan tarif pajak penghasilan sebesar 15% untuk jangka waktu 10 tahun.
- b. Infrastruktur dan Logistik.** Singapura dan Johor memiliki infrastruktur kelas dunia yang dapat menarik lebih banyak perusahaan global. Jika Batam tidak segera meningkatkan infrastruktur, seperti modernisasi Pelabuhan Batu Ampar, maka



Gambar B2.1 Rancangan Singapura-Johor Special Economic Zone

kawasan ini bisa kehilangan daya tariknya.

- c. **Ketersediaan lahan.** SJ SEZ mencakup area seluas **3.571 km²**, terdiri dari sembilan zona unggulan yang melayani berbagai sektor ekonomi. Jumlah ini hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada Batam dan Kepri.

Namun demikian, kita melihat bahwa Batam dan Kepri secara umum masih memiliki peluang untuk tetap bersaing dengan kawasan SJ SEZ. Beberapa faktor pendukung yang harus dioptimalkan antara lain:

- Lokasi yang strategis. Batam terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan hanya berjarak sekitar 20 km dari Singapura. Kedekatan ini memungkinkan Batam menjadi basis produksi yang lebih murah bagi perusahaan yang ingin tetap dekat dengan pusat perdagangan global seperti Singapura.
- Insentif Pajak dan Regulasi yang punya ruang untuk dioptimalkan. Sebagai bagian dari Free Trade Zone (FTZ), Batam menawarkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha seperti bebas bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang modal dan bahan baku industri.
- Biaya Produksi yang kompetitif. Salah satu daya tarik utama Batam adalah biaya tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan

dengan Singapura, (namun cukup berimbang dengan johor dan vietnam). Upah minimum regional (UMR) di Batam masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah rata-rata di Singapura yang mencapai SGD 4.500 per bulan. Perbedaan ini menjadikan Batam sebagai lokasi produksi yang lebih ekonomis bagi banyak perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan dari SJ SEZ, Batam perlu mengambil langkah-langkah strategis agar tetap memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi destinasi investasi yang menarik baik melalui peningkatan Infrastruktur, reformasi regulasi hingga peningkatan kualitas SDM. Tidak terkecuali, Batam harus mampu ambil kesempatan dan memanfaatkan peluang kehadiran SJ SEZ, misalnya dengan membangun ekosistem industri elektronik yang mendukung proses pengolahan produk dari hulu ke hilir sehingga dapat meningkatkan daya tarik industri elektronik di Batam. Dukungan yang diperlukan antara lain ketersediaan lahan dan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan air untuk pengembangan industri tersebut.

BOKS 3

Harga Gas Industri Naik, Industri Tetap Optimis

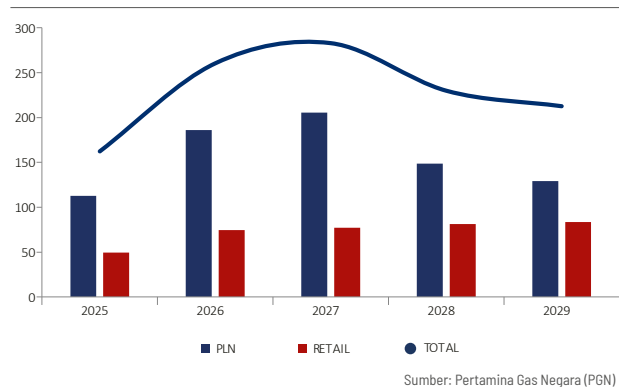
Pemerintah selama ini telah memberikan insentif tarif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri, yang bertujuan meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia. HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri strategis yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku atau sumber energi utama dalam proses produksinya. Sektor-sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan menyediakan energi yang lebih terjangkau.

HGBT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020, yang menetapkan harga gas bumi sebesar 6 USD/MMBTU¹. Dengan adanya HGBT ini, diharapkan industri dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan daya saing produk lokal di pasar global.

Namun, kebijakan HGBT telah berakhir pada tahun 2024, dan sampai saat ini perpanjangan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian ESDM. Selama proses kebijakan HGBT belum diperpanjang, perusahaan-perusahaan di Batam yang tadinya menerima HGBT mengalami penyesuaian harga menjadi harga gas pipa komersil, atau sekitar 8,54-9,02 USD/MMBTU. Bahkan di wilayah lain, seperti Pulau Jawa, harga gas dapat mencapai lebih dari 10 USD/MMBTU. Berakhirnya kebijakan HGBT di 2024 ini adalah satu hal penting.

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pasokan gas pipa (*supply*) saat ini yang masih perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan (*demand*). Berdasarkan data neraca gas dari Pertamina Gas Negara (PGN), total permintaan gas di Sumatera Tengah (termasuk estimasi kebutuhan Kepri), Sumatera Selatan dan Jawa Barat terus meningkat setiap tahun. Tahun 2025, kebutuhan gas diperkirakan 600 BBTUD² dan naik menjadi 650 BBTUD pada tahun 2028. Kebutuhan gas di Kepri sampai lima tahun kedepan diperkirakan akan tetap tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan PLN, retail, termasuk industri.

Disisi lain, pasokan yang tersedia semakin terbatas. Produksi gas pipa secara nasional saat ini dihadapkan dengan kondisi *natural declining*. Di Kepri sendiri, juga terjadi defisit pasokan gas. Pasokan gas pipa yang



Grafik B3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024

tersedia sekitar 43,35 BBTUD yang dialokasikan untuk PLN dan retail, termasuk industri. Sehubungan dengan hal tersebut, industri memiliki alternatif pengganti gas pipa sebagai bahan baku dan energinya. Opsi yang tersedia adalah menggunakan *Liquefied Natural Gas (LNG)* atau Gas Alam Cair dengan harga LNG 16,77 USD/MMBTU. Kondisi ini menjadi tantangan bagi industri dalam menjaga efisiensi biaya produksi (*cost of production*).

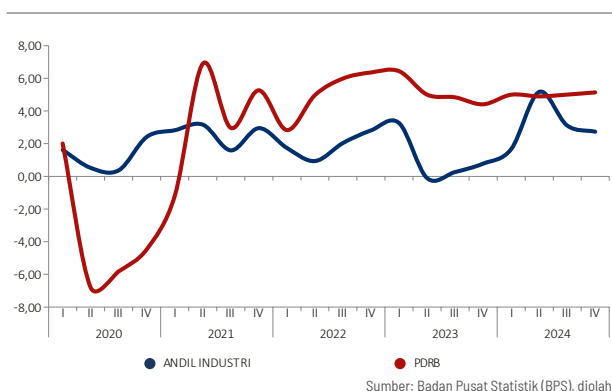
INDUSTRI PENGOLAHAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI KEPRI

Sebagai provinsi yang memiliki kawasan industri strategis, Kepri sangat bergantung pada sektor industri pengolahan. Data dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) mencatat jumlah kawasan industri eksisting di Batam saat ini sebanyak 30 kawasan. Jumlah ini meningkat dari 9 kawasan pada 1997 menjadi 30 kawasan pada 2023. Selain itu, total industri yang beroperasi di dalamnya mencapai 700-an pelaku industri yang didominasi sektor manufaktur elektronik, logam, dan galangan kapal.

Rilis PDRB triwulan IV-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kepri tercatat 5,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jika dilihat secara sektoral, Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73% terhadap ekonomi Kepulauan Riau. Jika dilihat secara historis selama lima tahun terakhir, peran industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri terbukti masih dominan dibandingkan sektor lain.

1 Metric Million British Thermal Units

2 Billion British Thermal Units Per Day



Grafik B3.2 PDRB dan Andil Industri di Kepri (% , yoy)

Bahkan pada saat pandemi Covid-19, industri pengolahan masih bisa tumbuh positif.

Meskipun jumlah perusahaan yang menikmati HGBT relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah industri yang ada di Kepri, namun dampak rambatannya perlu menjadi perhatian. Gas bumi yang selama ini dinikmati dengan harga lebih rendah telah menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri di Kepri (Batam), terutama bagi sektor yang membutuhkan energi besar.

MENCARI SOLUSI, MENJAGA OPTIMISME

Pada jangka pendek dan solusi paling mendesak, Kementerian ESDM diharapkan dapat segera memberlakukan peraturan baru mengenai implementasi skema HGBT. Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan fiskal negara, sehingga industri tetap mendapatkan harga gas yang kompetitif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Sementara itu, untuk jangka panjang perlu adanya upaya bersama yang berorientasi pada ketahanan energi. Terkait dengan isu *natural declining*, perlu disegerakan eksplorasi terhadap sumber gas baru. Khusus untuk pemenuhan energi di Kepri, terdapat potensi pengalihan gas pipa yang bersumber dari Natuna yang selama ini difokuskan untuk diekspor ke Singapura dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, industri harus didorong untuk mengadopsi teknologi hemat energi dan mulai bertransisi ke sumber energi alternatif dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas bumi bersubsidi.

BAB II

Perkembangan Keuangan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2024

91,88%
Rp13,90 T



Tw IV
2023

95,99%
Rp13,73 T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2024

87,63%
Rp13,80 T



Tw IV
2023

90,92%
Rp13,95 T

Realisasi Belanja APBN



Tw IV
2024

91,89%
Rp17,17 T



Tw IV
2023

93,40%
Rp17,93 T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw IV
2024

96,30%
Rp1,78 T



Tw IV
2023

90,76%
Rp2,18 T



Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2024 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

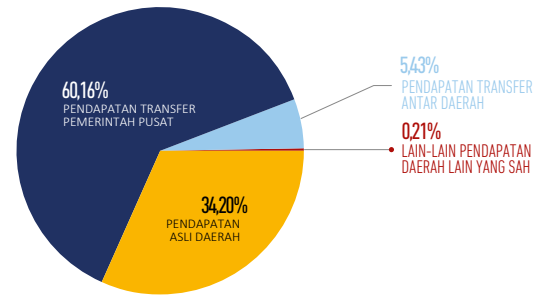


Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat sebesar 91,88%, sementara realisasi belanja mencapai 87,63% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 95,99%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu, realisasi belanja juga mengalami penurunan dari 90,92% menjadi pada tahun 2023 menjadi 87,63% pada tahun 2024. Penurunan realisasi belanja terutama terjadi pada pos Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

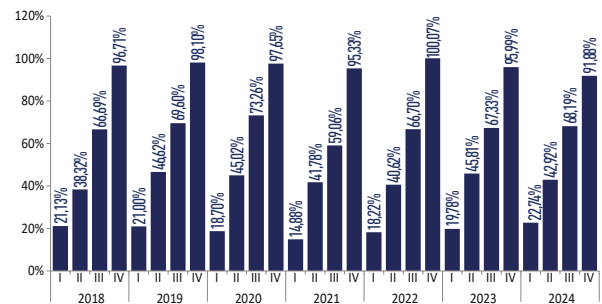
Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan IV 2024 mencapai 91,88% dari total anggaran atau sebesar Rp13,90 triliun. Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar 95,99% dari total anggaran. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun demikian, penurunan realisasi anggaran yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan persentase pada pos Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2024 mencapai Rp8,36 triliun atau sebesar 90,72% dari pagu anggaran dan memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 60,16% dari pagu anggaran. Capaian tersebut secara persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 96,34% dari pagu. Penurunan tersebut terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Realisasi dana perimbangan sampai triwulan IV 2024 mencapai 90,43% dari pagu anggaran, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,16%, didorong oleh realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik, dan Dana Alokasi Non Fisik yang realisasinya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dana Desa mengalami penurunan menjadi hanya terealisasi sebesar 99,29% pada triwulan IV 2024 lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya yang dapat mencapai 101,12%. Sementara itu, pos Dana Insentif Daerah (DID) yang pada tahun 2024 tidak ada dan digantikan oleh pos Dana Insentif Fiskal yang pada triwulan IV 2024 terealisasi sebesar 98,50% atau Rp79,25 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp80,46 miliar. Dengan demikian, dari sisi nominal realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp8,69 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp8,36 triliun pada triwulan IV 2024.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024

Di sisi lain, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2024 tumbuh lebih tinggi dan tercatat sebesar Rp4,75 triliun atau 95,45% dari pagu anggaran. Realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 93,34% dari pagu anggaran atau sebesar Rp4,25 triliun. Peningkatan capaian PAD berasal terutama berasal dari pos Retribusi Daerah dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Retribusi Daerah meningkat mencapai 90,62% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,08%. Hal ini didorong dengan adanya kebijakan peningkatan tarif parkir di Kota Batam sejak Januari 2024 sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Di sisi lain, secara persentase realisasi pada pos Pajak Daerah menurun menjadi 82,40% pada triwulan IV 2024 dari 99,18% pada triwulan IV 2023 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp3,96 triliun dari sebesar Rp3,61 triliun pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan IV 2024 meningkat sebesar Rp335,92 miliar menjadi sebesar Rp3,92 triliun dari sebesar Rp3,58 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya mengindikasikan Pendapatan Asli Daerah tetap meningkat secara nominal dibandingkan periode sebelumnya.

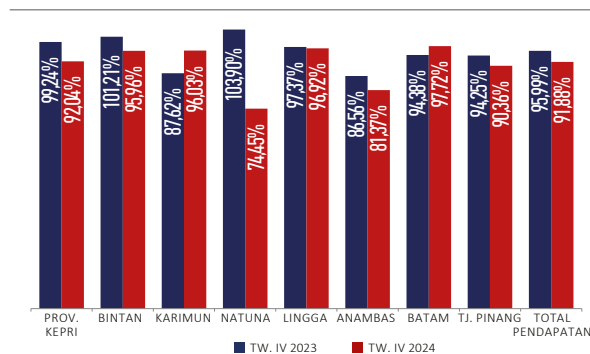
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	4.981,16	55,10%	4.754,59	95,45%	34,20%
Pajak Daerah	3.958,71	26,17%	3.917,59	82,40%	
Retribusi Daerah	603,80	26,17%	547,15	90,62%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	64,76	0,43%	-	0,00%	
Lain-lain PAD yang Sah	353,89	2,34%	289,84	81,90%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.218,41	60,93%	8.363,10	90,72%	60,16%
Dana Perimbangan	8.912,20	0,59	8.059,70	90,43%	
Dana Insentif Fiskal*	80,46	0,01	79,25	98,50%	
Dana Desa	225,75	0,01	224,15	99,29%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	891,59	5,89%	754,87	84,67%	5,43%
Pendapatan Bagi Hasil	891,59	5,89%	754,87	84,67%	
Bantuan Keuangan**	-	0,00%	-	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,04	0,25%	28,54	75,02%	0,21%
Hibah	4,73	0,03%	2,27	48,08%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	33,31	0,22%	26,26	78,85%	
TOTAL PENDAPATAN	15.129,20	100,00%	13.901,10	91,88%	

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal

**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan IV 2024 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp3,65 triliun atau 97,72% dari total anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 26,16% dari total realisasi pendapatan sehingga mempengaruhi realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepri. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang masing-masing mencapai sebesar 96,92% dan 96,03% dari pagu anggaran tahun ini. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 92,04% dari pagu anggaran.

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan IV 2024 mencapai 87,63% dari pagu anggaran atau sebesar Rp13,80 triliun. Pencapaian

realisasi belanja yang menurun secara presentase tersebut terjadi pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan menjadi 11,73% terhadap total anggaran tahun 2024, meningkat dari 7,29% pada tahun 2023. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 79,23%, diikuti Belanja Modal sebesar 12,08%, Belanja Transfer sebesar 8,65%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,03%.

Realisasi Belanja Operasi tercapai sebesar 90,17% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp10,94 triliun. Pencapaian realisasi tersebut secara presentase lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 92,36%, namun berdasarkan nominalnya lebih tinggi Rp464,61 miliar dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2023 sebesar Rp10,47 triliun. Secara umum, penurunan persentase pencapaian realisasi pada tahun 2024 disebabkan oleh pagu anggaran belanja yang lebih tinggi, namun secara nominal realisasi belanja tidak menurun secara signifikan. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar Belanja Operasi mencapai 95,51% dari pagu anggaran pos Belanja Operasi yakni sebesar Rp5,64 triliun, secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp4,87 triliun. Selain itu, Belanja Hibah terealisasi 90,86% atau sebesar Rp823,08 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 87,28%. Sementara itu, pencapaian realisasi pada pos Belanja Operasi tertahan oleh penurunan realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa yang tercapai sebesar tercapai 84,09%, Belanja Bunga yang tercapai sebesar 91,17%, dan Belanja Subsidi yang tercapai sebesar 77,14% sampai dengan triwulan IV 2024. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024

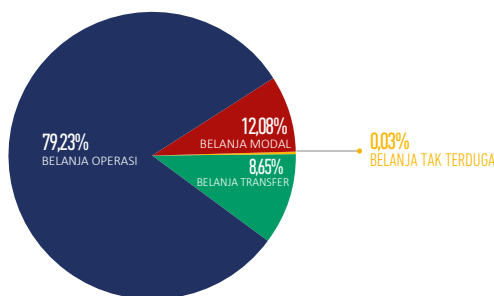
Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	12.129,54	77,00%	10.937,46	90,17%	79,23%
Belanja Pegawai	5.909,60	37,52%	5.644,00	95,51%	
Belanja Barang dan Jasa	5.281,30	33,53%	4.441,30	84,09%	
Belanja Bunga	4,05	0,03%	3,69	91,17%	
Belanja Subsidi	2,89	0,02%	2,23	77,14%	
Belanja Hibah	905,89	5,75%	823,08	90,86%	
Belanja Bantuan Sosial	25,80	0,16%	23,16	89,76%	
Belanja Modal	2.239,82	14,22%	1.667,67	74,46%	12,08%
Belanja Modal Tanah	12,58	0,08%	3,67	29,14%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484,69	3,08%	324,11	66,87%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	738,15	4,69%	543,84	73,68%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	938,39	5,96%	756,07	80,57%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61,40	0,39%	37,82	61,60%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4,61	0,03%	2,16	46,89%	
Belanja Tidak Terduga	39,24	0,25%	4,60	11,73%	0,03%
Belanja Transfer	1.343,49	8,53%	1.194,15	88,88%	8,65%
Belanja Bagi Hasil	775,88	4,93%	670,31	86,39%	
Belanja Bantuan Keuangan	567,61	3,60%	523,84	92,29%	
TOTAL BELANJA	15.752,08	100,00%	13.803,89	87,63%	
SURPLUS/DEFISIT	-622,89		97,21		
Pembiayaan Neto	711,17		253,10	35,59%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	806,72		276,09	34,22%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	95,55		22,99	24,06%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	88,28		350,32		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

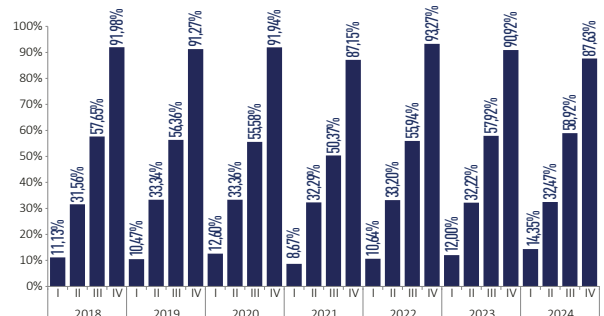
Pertumbuhan realisasi belanja tertahan oleh penyerapan pos Belanja Modal pada triwulan IV 2024. Realisasi pada pos Belanja Modal mencapai 74,46% dari pagu anggaran atau Rp1,67 triliun, dengan pangsa sebesar 12,08% dari seluruh pos anggaran belanja. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 86,54% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pagu anggaran Belanja Modal secara keseluruhan meliputi pos anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan,

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang menurun jika dibandingkan realisasi pada triwulan IV tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi belanja juga dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Belanja Transfer yaitu Belanja Bagi Hasil. Realisasi Belanja Transfer tercapai 88,88% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,19 triliun, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,75% atau sebesar Rp1,30 triliun. Hal ini

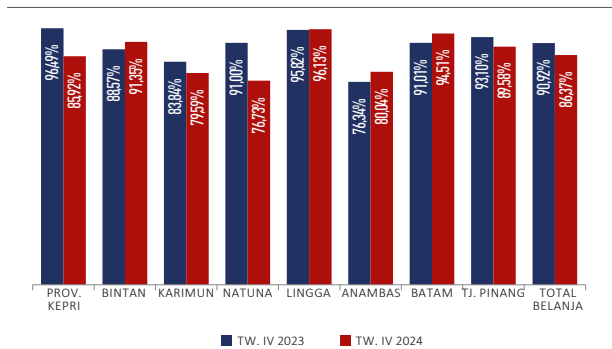


Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2024

Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2024



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)
Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

didorong dengan realisasi Belanja Bagi Hasil yang menurun mencapai 86,39%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 96,33%. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada desa mengalami penurunan dari 92,44% menjadi 92,29%, meskipun secara nominal meningkat Rp9,08 miliar dari triwulan IV 2023 menjadi sebesar Rp523,24 miliar pada triwulan IV 2024.

Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan IV 2024 yakni Kabupaten Lingga yang mencapai 96,13% dari total anggaran atau sebesar Rp1,05 triliun, diikuti Kota Batam yang mencapai 94,51% dari total anggaran atau sebesar Rp3,63 triliun, dan Kabupaten Bintan yang mencapai 91,35% atau sebesar Rp1,26 triliun.

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Secara keseluruhan pada 2024, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15,16 triliun dari Rp11,52 triliun, sementara target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp18,68 triliun dari Rp19,20 triliun pada tahun 2023. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp12,45 triliun. Sementara, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

Uraian	Target	Realisasi Triwulan IV 2023	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan IV 2024	% Realisasi	Pertumbuhan %
A. Pendapatan Negara	11.519,71	12.287,00	106,66%	15.155,62	13.771,66	90,87%	12,08%
I. Pajak Dalam Negeri	9.209,34	9.829,88	106,74%	12.448,53	10.582,10	85,01%	7,65%
1 Pajak Dalam Negeri	8.528,78	8.999,93	105,52%	11.797,69	9.973,91	84,54%	10,82%
2 Pajak Perdagangan Internasional	680,56	829,95	121,95%	650,85	608,19	93,45%	-26,72%
II. PNB	2.310,37	2.457,12	106,35%	2.707,09	3.189,56	117,82%	29,81%
1 Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3 Pendapatan BLU	1.909,97	1.584,81	82,98%	2.311,07	2.382,05	103,07%	50,31%
4 PNB Lainnya	400,40	872,31	217,86%	396,02	807,51	203,91%	-7,43%
III. Hibah	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
B. Belanja Negara	19.192,76	17.926,49	93,40%	18.682,57	17.166,89	91,89%	-4,24%
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.898,10	8.726,49	88,16%	10.501,28	9.130,36	86,95%	4,63%
1 Belanja Pegawai	2.072,02	2.010,67	97,04%	2.264,29	2.239,50	98,90%	11,38%
2 Belanja Barang	4.944,82	4.401,58	89,01%	4.824,65	4.103,79	85,06%	-6,77%
3 Belanja Modal	2.630,22	2.073,11	78,82%	3.149,61	2.779,38	88,25%	34,07%
4 Belanja Bansos	4,59	4,54	98,71%	7,82	7,70	98,43%	69,69%
5 Belanja Lainnya	246,44	236,60	96,01%	254,91	0,00	0,00%	-100,00%
II. Transfer ke Daerah (TKD)	9.294,66	9.200,00	98,98%	8.181,29	8.036,53	98,23%	-12,65%
1 Dana Bagi Hasil (DBH)	2.447,33	2.446,94	99,98%	1.149,18	1.149,09	99,99%	-53,04%
2 Dana Alokasi Umum (DAU)	4.474,84	4.464,78	99,78%	4.817,40	4.748,06	98,56%	6,34%
3 DAK Fisik	805,94	755,76	93,77%	648,36	602,83	92,98%	-20,23%
4 DAK Non Fisik	1.173,84	1.139,97	97,11%	1.245,31	1.219,10	97,89%	6,94%
5 Dana Desa	225,94	225,78	99,93%	227,05	226,46	99,74%	0,30%
6 Dana Insentif Fiskal	166,77	166,77	100,00%	93,99	90,98	96,80%	-45,44%
7 Transfer Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. SURPLUS/(DEFISIT)	-7.673,05	-5.639,49	73,50%	-3.526,94	-3.395,23	96,27%	-39,80%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

pos anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) menjadi Rp8,18 triliun pada triwulan IV 2024 dari Rp9,29 triliun pada triwulan IV 2023.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 mencapai 90,87% dari pagu atau sebesar Rp13,77 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 106,66% dari pagu. Meskipun secara presentase lebih rendah, secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi dari triwulan IV 2023 yang tercapai sebesar Rp12,29 triliun dan tumbuh sebesar 12,08% (yoy) seiring dengan kenaikan target pendapatan pada pagu anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan nominal pendapatan pajak dalam negeri sebesar tumbuh sebesar 10,82% (yoy) dengan nilai mencapai Rp10,58 triliun atau 85,01% dari pagu anggaran. Selain itu, pendapatan APBN turut didukung oleh pertumbuhan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasinya sebesar 117,82% dari target atau sebesar Rp3,19 triliun yang telah melampaui target sebesar Rp2,71 triliun, pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2023. Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 103,07% (yoy), mencapai Rp2,38 triliun atau 103,07% dari target, angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 50,31% (yoy).

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 mencapai 91,89% dari pagu atau sebesar Rp17,17 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 93,40% dari pagu. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 berkontraksi 4,24% (yoy). Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 86,95% dari target dan 98,23% target, lebih rendah dari triwulan IV 2023. Untuk komponen Belanja Pemerintah Pusat penurunan terutama terjadi pada Belanja Barang yang berkontraksi sebesar 6,77% (yoy). Di samping itu, pada komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2024, berkontraksi sebesar 12,65% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkontraksi sebesar 53,04% (yoy), DAK Fisik yang berkontraksi sebesar 20,23% (yoy), serta Dana Insentif Fiskal

yang berkontraksi sebesar 45,44% (yoy). Pada triwulan IV 2024, Neraca APBN menunjukkan defisit sebesar Rp3,39 triliun.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 96,30% atau Rp1,78 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 90,76%. Belanja untuk proyek infrastruktur terutama untuk proyek program ketahanan sumber daya air dan konektivitas darat yang realisasinya masing-masing mencapai 99,48% dan 99,29% dari pagu anggaran. Pengembangan konektivitas darat tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46 Kab. Bintan, pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penanganan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga di Kab. Natuna. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pengembangan konektivitas udara terealisasi 91,38% dari total anggaran atau sebesar Rp58,54 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan proyek pengembangan pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo armada udara di Kota Batam yang telah berlangsung dan memasuki tahap penyelesaian. Selain itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 87,04% atau Rp359,18 miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan IV 2023			Triwulan IV 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	157,63	155,63	98,73%	64,06	58,54	91,38%
2	Konektivitas Laut	360,05	296,79	82,43%	412,68	359,18	87,04%
3	Konektivitas Darat	1.795,29	1.639,54	91,32%	1.149,88	1.141,70	99,29%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	89,46	88,41	98,83%	221,08	219,92	99,48%
Total		2.402,43	2.180,37	90,76%	1.847,70	1.779,34	96,30%

Sumber: KFR Triwulan III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri



BAB III

Inflasi

Provinsi Kepri (yoy)



Tw IV
2024

2,09%

Tw III
2024

2,53%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw IV
2024

1,53%

Tw III
2024

1,36%

Kota Batam (yoy)



Tw IV
2024

2,24%

Tw III
2024

2,76%

Kab. Karimun (yoy)



Tw IV
2024

1,57%

Tw III
2024

2,04%

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kelompok pendidikan. Dengan demikian, inflasi akhir tahun 2024 tetap terkendali dan berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok: (1) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (2) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun; serta (3) kelompok pendidikan. Secara spasial, inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 2,76% (yoy) menjadi 2,24% (yoy) pada triwulan IV 2024. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Karimun yang mengalami penurunan inflasi dari 2,04% (yoy) menjadi 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024. Sementara untuk Kota Tanjungpinang terdapat peningkatan inflasi dimana sebelumnya tercatat sebesar 1,36% (yoy) menjadi 1,53% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional mengalami penurunan dari 1,84% (yoy) menjadi sebesar 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Pada bulan Desember 2024, secara bulanan IHK Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pada September 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm). Inflasi pada Desember 2024 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,61% (mtm) terutama disumbang oleh kenaikan harga kangkung, telur ayam ras, santan segar, cabai merah, dan bayam. Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm), sejalan dengan naiknya tarif angkutan udara karena peningkatan permintaan jelang libur akhir tahun. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,01% (mtm) didorong oleh kenaikan biaya pembuatan paspor.

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57
Inflasi Kepri	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09
Inflasi Tanjungpinang	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53
Inflasi Batam	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24
Inflasi Karimun									2,57	2,79	2,04	1,57

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Desember 2024

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Kangkung	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,08
2	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,07
3	Santan Segar	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
4	Cabai Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
5	Bayam	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
6	Angkutan Udara	Transportasi	0,06
7	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
8	Bawang Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,05
9	Kacang Panjang	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,04
10	Sawi Hijau	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,03

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Provinsi Kepri Desember 2024

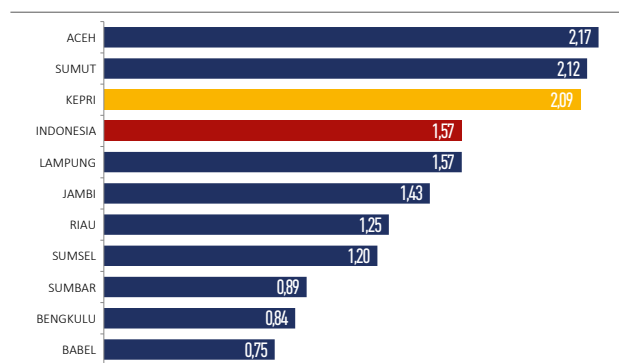
No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,03
2	Tomat	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,02
3	Pisang	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01
4	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,01
5	Ikan Layang/Ikan Benggol	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

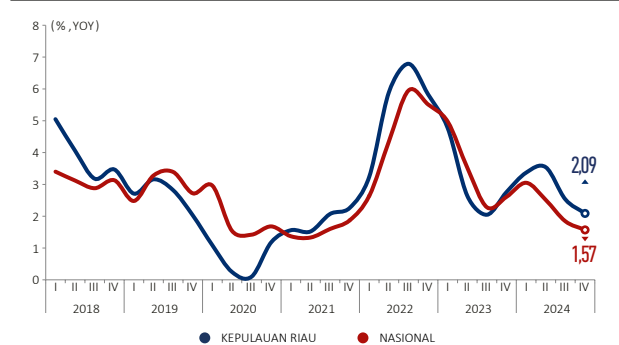
Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,53% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan lebih dengan inflasi Nasional sebesar 1,57% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tetap terkendali dan berada di sekitar kisaran sasaran inflasi tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 disebabkan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman,



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan IV 2024 Regional Sumatera (% yoy)



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau dan Nasional Triwulan IV 2024 (% yoy)

Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)

No	Kelompok	2022								2023								2024							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12	1,61	5,40	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92	0,20	3,87	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08	0,25	1,50	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77	0,03	0,69	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22
5	Kesehatan	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45	0,01	0,35	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24
6	Transportasi	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18	0,12	0,87	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22	0,02	0,27	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75	0,01	0,73	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38
9	Pendidikan	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80	0,16	2,80	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63	0,05	0,66	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63	0,30	4,52	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53
Umum		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05		2,76		3,37		3,54		2,53		2,09	

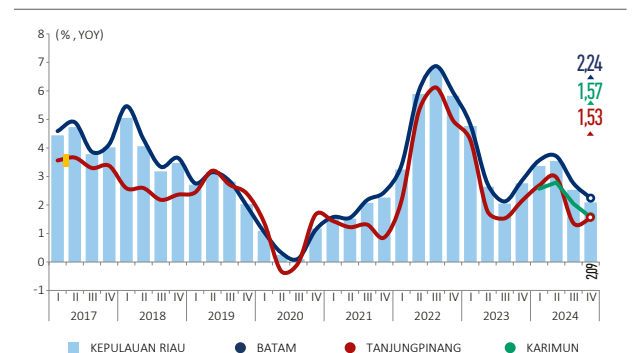
Sumber: BPS (data diolah)

dan Tembakau dengan andil 0,72% (yoy), yang sebelumnya tercatat menyumbangkan andil 1,00% (yoy). Selanjutnya menyusul Kelompok Transportasi yang turun sebanyak 0,17% (yoy) dibanding triwulan III 2024, atau turun dari 0,47% (yoy) menjadi 0,30% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menurun disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan antara lain cabai merah, cabai rawit, bayam, sawi hijau, dan daun bawang sejalan dengan membaiknya pasokan untuk komoditas dimaksud. Inflasi yang lebih rendah juga disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara di triwulan IV 2024 sebagai akibat imbauan pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan udara pada momen HBKN.

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA

Secara spasial, dua Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Kabupaten Karimun pada triwulan IV 2024 mencatatkan inflasi dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76% (yoy). Begitu pula inflasi Kabupaten Karimun yang mengalami penurunan dari 2,04% (yoy) menjadi sebesar 1,57% (yoy). Sementara itu, Kota Tanjungpinang mencatatkan kenaikan pada inflasi dari yang sebelumnya 1,36% (yoy) menjadi 1,53% (yoy) pada triwulan IV 2024. Dengan demikian, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy).



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan IV 2024 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat memiliki andil 0,64% (yoy) atau menurun sebesar 0,33 persen poin menjadi 0,64% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah. Selain itu, tekanan inflasi menurun pada Kelompok Transportasi yang turun sebesar 0,24% (yoy) yang didorong akibat penurunan harga bensin dan tarif angkutan udara.

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,36% (yoy). Tekanan inflasi yang lebih tinggi tersebut utamanya

Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	II-2023		III-2023		IV-2023		I-2024			II-2024			III-2024			IV-2024		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,44	-0,15	0,98	0,53	2,74	1,19	1,98	1,56	1,47	1,88	1,79	1,86	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09
Pakaian dan Alas Kaki	0,16	0,01	0,24	-0,03	0,16	0,02	0,18	-0,02	0,23	0,20	-0,18	0,23	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,39	0,37	0,37	0,18	0,44	0,03	0,19	0,03	0,01	0,18	-0,01	0,01	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,10	0,02	0,04	0,04	0,19	0,04	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03	-0,04	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12
Kesehatan	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,07	0,14	0,17	0,07	0,14	0,15	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18
Transportasi	1,16	1,12	-0,06	0,27	1,57	0,25	0,72	0,28	-0,01	0,65	0,36	0,01	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
Pendidikan	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,19	0,15	0,00	0,19	0,15	0,00	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,02	0,13	0,02	0,24	0,16	0,27	0,03	0,30	0,49	0,13	0,39	0,31	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,30	0,13	0,32	0,16	0,44	0,20	0,27	0,24	0,25	0,43	0,31	0,25	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19
Umum	2,75	1,78	2,12	1,53	2,85	2,14	3,56	2,68	2,57	3,71	2,97	2,79	2,76	1,36	2,04	2,24	1,53	1,57

Sumber: BPS (data diolah)

disebabkan oleh peningkatan andil inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat naik sebesar 0,23 persen poin atau sebesar 1,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil sebesar 0,77% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga beras dan sigaret kretek mesin. Selain itu, tekanan inflasi juga terjadi akibat didorong oleh peningkatan andil kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen poin seiring dengan kenaikan biaya pendidikan utamanya untuk Taman Kanak-Kanak, Akademi/Perguruan Tinggi, dan Biaya Les Privat.

3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,04% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun tersebut disebabkan oleh penurunan andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami penurunan andil sebesar 0,50 persen poin atau turun dari 1,59% (yoy) menjadi 1,50% (yoy) seiring dengan penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan bayam. Selanjutnya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami penurunan andil sebesar 0,10% seiring dengan penurunan harga komoditas sabun cair/cuci piring dan pembersih lantai.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni $2,5 \pm 1\%$, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada triwulan I 2025 diperkirakan *ontrack* seiring dengan peningkatan permintaan akibat HBKN yang dinormalisasi

dengan penurunan mobilisasi pemerintah yang dapat mendorong penurunan tarif angkutan laut dan angkutan udara sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja pemerintah.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Januari 2025, Provinsi Kepri mengalami inflasi 0,43% (mtm), menurun dibandingkan Desember 2024 yang mengalami inflasi 0,68% (mtm). Inflasi pada Januari 2025 terutama disebabkan oleh Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,72% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil inflasi 0,09% (mtm) yang didorong oleh peningkatan harga mie dan nasi dengan lauk. Selain itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami inflasi dan memberikan andil sebesar 0,04% (mtm) yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2025 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi dari normal sehingga dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat mengganggu produksi komoditas pangan. (ii) Pengaruh *base line* sejalan dengan penurunan harga pangan pada semester kedua 2024. (iii) Relaksasi kebijakan moneter secara global yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025 dan (iv) Harga emas global masih berada pada tren meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter AS. Di sisi lain, faktor yang menahan kenaikan inflasi antara lain *high base effect* sejalan dengan kenaikan tarif parkir dan tarif listrik pada tahun 2024 dan prakiraan harga komoditas

energi global yang lebih stabil pada tahun 2025. Selain itu, program GNPIP yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia juga diharapkan dapat meredam tekanan inflasi tahun 2025.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan IV 2024 antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri. Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 144 kali pasar murah sejak awal tahun.
2. Penyaluran SPHP oleh Bulog sejumlah 1559 kali penyaluran ke berbagai Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Kota Batam dan 705 kali penyaluran di Kabupaten Natuna.

B. Ketersediaan Pasokan

1. Penyaluran traktor sebagai sarpras budidaya pertanian pada November 2024 dan *solar dome* sebagai sarpras pasca panen pada Desember 2024.
2. Penyaluran bantuan 3 unit *greenhouse* untuk mendorong budidaya pertanian di bulan Desember 2024.
3. Penyaluran bantuan 5 buah rumah pemasaran untuk hilirisasi dan pasca panen sepanjang triwulan IV 2024

C. Kelancaran Distribusi

1. Penandatanganan KAD B2B antara PT. Pelabuhan Karimun dengan Perum Bulog Kantor Cabang Batam untuk pengadaan dan pembelian minyak kita dan komoditi lainnya pada Desember 2024.
2. Pengiriman produk berupa cabai merah keriting dari Koperasi Plasma Agri Kundur Kabupaten Karimun kepada Koperasi KTSBB Kota Batam sepanjang 2024.

3. Pemberian fasilitasi distribusi pangan berupa bantuan sewa kendaraan ataupun bongkar muat pada pelaksanaan program sembako bersubsidi, pasar murah, serta pangan murah

D. Komunikasi Efektif

1. *Site Visit* ke klaster binaan KPwBI Malang tanggal 11-14 November 2024 untuk mereplikasi budidaya cabai merah dengan menggunakan metode *vertical farming*.
2. Digitalisasi data pengendalian inflasi melalui dashboardtpi.com
3. Hingga Desember 2024, telah terlaksana sebanyak 39 kali penguatan koordinasi kelembagaan, baik di level kab/kota maupun provinsi.
4. Hingga Desember 2024, telah dilaksanakan 4 kali kegiatan *Capacity Building* yang merupakan hasil sinergi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepri. Salah satunya adalah *capacity building* TPID se-Provinsi Kepulauan Riau tentang penguatan peta jalan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada 10 Desember 2024.
5. Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidental. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, *talkshow* radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sejumlah strategi telah dan akan dilakukan oleh TPID sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dalam menghadapi berbagai tantangan inflasi ke depan. Pengendalian inflasi pangan dengan implementasi 7 (tujuh) program unggulan GNPIP dengan menghasilkan inovasi pemanfaatan IoT pada budidaya hidroponik, integrasi data pertanian, dan kelas digital (*smart agriculture*) kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan. Selain itu, penguatan pasokan melalui pembentukan *command center* KAD yang bertindak sebagai pusat informasi dan kebijakan terkait dengan kebutuhan daerah surplus dan defisit. Dalam penguatan KAD tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antar daerah akan dilakukan untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih optimal. Penguatan KAD tersebut juga akan didukung oleh penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Aset* (yoy)



Tw IV
2024

13,45%
Rp105,34 T

Tw III
2024

14,73%
Rp103,72 T

Kredit** (yoy)



Tw IV
2024

10,93%
Rp79,32 T

Tw III
2024

5,99%
Rp74,34 T

Kredit* (yoy)



Tw IV
2024

10,04%
Rp53,11 T

Tw III
2024

9,42%
Rp51,96 T

Dana* (yoy)



Tw IV
2024

14,13%
Rp91,07 T

Tw III
2024

15,36%
Rp89,14 T

LDR*



Tw IV
2024

87,10%

Tw III
2024

83,39%

NPL*



Tw IV
2024

2,90%

Tw III
2024

3,29%

UMKM



Tw IV
2024

17,29%
Rp14,83 T

Tw III
2024

14,89%
Rp14,30 T

* dari bank yang berlokasi di Kepri,

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tecermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tecermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara risiko kredit sektor rumah tangga meningkat.



Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tetap kuat, tecermin dari jumlah kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih terjaga. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 9,42% (yoy). Sementara jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 10,93% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,36% (yoy). Sementara, total Aset tercatat tumbuh sebesar 13,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,73% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga. Berdasarkan lokasi bank, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan menjadi 58,31%, setelah tercatat sebesar 58,29% pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan lokasi proyek, LDR Kepri tercatat 87,10%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 83,39%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio *NPL gross* yang tercatat sebesar 2,90%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,29%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM tumbuh positif dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 17,29% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,89% (yoy). Peningkatan kredit UMKM pada triwulan IV 2024 didorong oleh LU Listrik, Gas dan Air yang meningkat sebesar 1.663% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 186,11% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi tercatat sebesar 80,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,68% (yoy).

4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,93% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy). Peningkatan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan dan LU Listrik, Gas, dan Air. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit disebabkan oleh membaiknya penyaluran kredit modal kerja.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 13,45% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,73% (yoy). Di samping itu, DPK tumbuh sebesar 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,36% (yoy). Deselerasi tersebut terutama terjadi pada giro dan tabungan, sedangkan deposito tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih instrumen jangka panjang seperti deposito. Pada triwulan IV 2024, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, yang tecermin dari menurunnya tingkat kredit bermasalah (rasio *NPL gross*) dari 3,29% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,90%.

4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 berjumlah Rp105,34 triliun atau tumbuh 13,45% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 14,73% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Persero yang tumbuh sebesar 20,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,67% (yoy). Aset Bank Swasta dan BPD termoderasi masing-masing menjadi 8,39% dan 0,88% dari sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 10,51% dan 10,16%. Di sisi lain, aset kelompok Bank Asing dan Campuran mengalami kontraksi hingga 100% (yoy), seiring dengan tidak adanya lagi aset dari kelompok bank tersebut di Kepri sejak November 2024. Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 49,85%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (44,17%), dan BPD (5,98%).

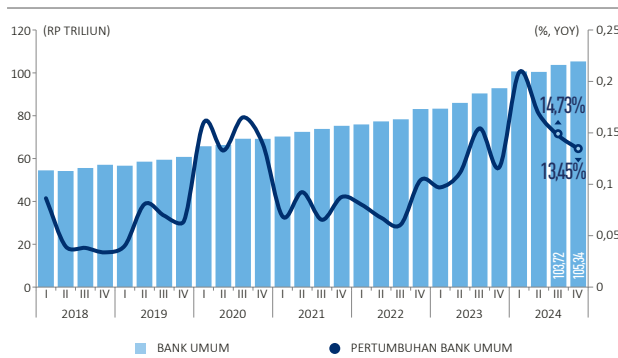
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	2023 (Rp Triliun)				2024 (Rp Triliun)				Pertumbuhan (%, YoY)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw I 2024	Tw II 2024	Tw III 2024	Tw IV 2024
Total Aset*	83,29	85,97	90,40	92,85	100,68	100,45	103,72	105,34	20,88%	16,84%	14,73%	13,45%
Total Dana*	71,84	72,11	77,27	79,80	82,20	86,84	89,14	91,07	14,41%	20,44%	15,36%	14,13%
Total Kredit*	45,16	46,06	47,49	48,26	48,61	51,19	51,96	53,11	7,64%	11,14%	9,42%	10,04%
Total Kredit**	65,81	67,33	70,13	71,51	71,72	73,69	74,34	79,32	8,98%	9,45%	5,99%	10,93%
NPL*	2,14%	2,29%	4,33%	3,88%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	-	-	-	-
LDR**	91,60%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	-	-	-	-

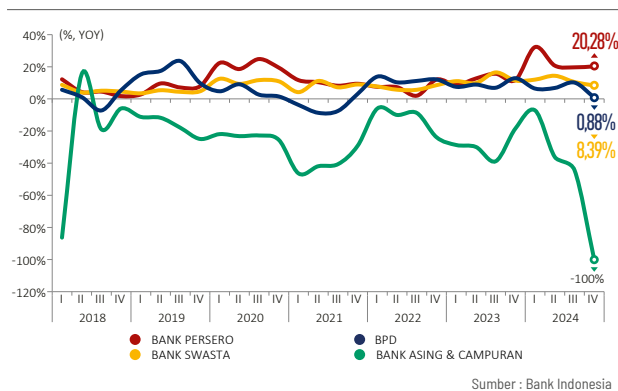
Sumber: LBUT Bank Indonesia

*) dari bank yang berlokasi di Kepri,

**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



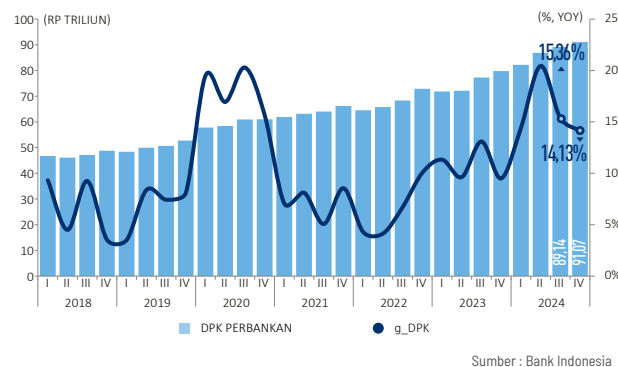
Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



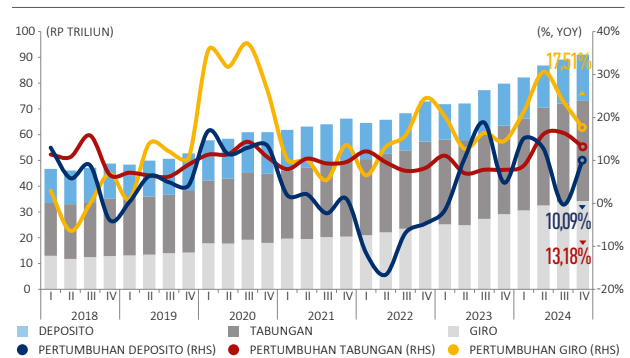
Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan IV 2024, total DPK di Kepri berjumlah Rp91,07 triliun atau tumbuh 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,36% (yoy) atau berjumlah Rp89,14 triliun. Penurunan tersebut bersumber dari giro dan tabungan yang masing-masing termoderasi sebesar 17,51% (yoy) dan 13,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III yang masing-masing tumbuh sebesar 23,85% (yoy) dan 16,43% (yoy). Sementara, deposito mengalami peningkatan dari -0,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya



Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan

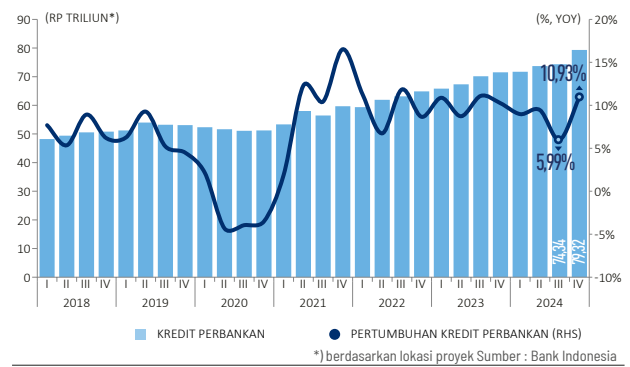


Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

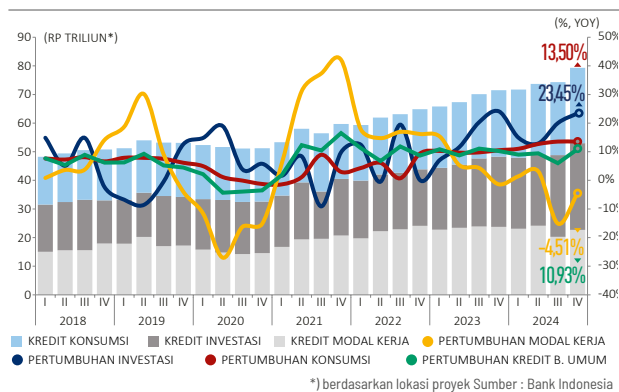
menjadi 10,09% (yoy). Hal ini menunjukkan preferensi simpanan masyarakat pada instrumen yang lebih *profitable* meningkat. Struktur DPK pada triwulan IV 2024 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,67%, diikuti giro 37,62% dan deposito 19,71%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 sebesar Rp79,32 triliun atau tumbuh 10,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% (yoy). Peningkatan terutama bersumber dari kredit investasi yang tercatat tumbuh 23,45% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,04% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan kredit modal kerja mengalami perbaikan dari yang sebelumnya berkontraksi 15,13% (yoy) menjadi berkontraksi 4,51% (yoy) di triwulan IV 2024. Disisi lain, kredit konsumsi tumbuh sebesar 13,50% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2024 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 38,20%, diikuti oleh kredit konsumsi 33,20% dan kredit modal kerja sebesar 28,60%.

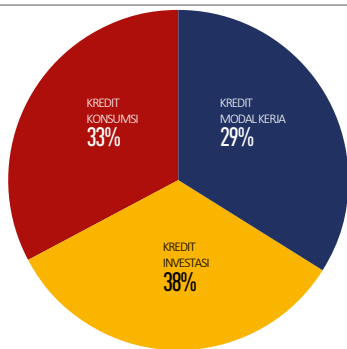


Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan

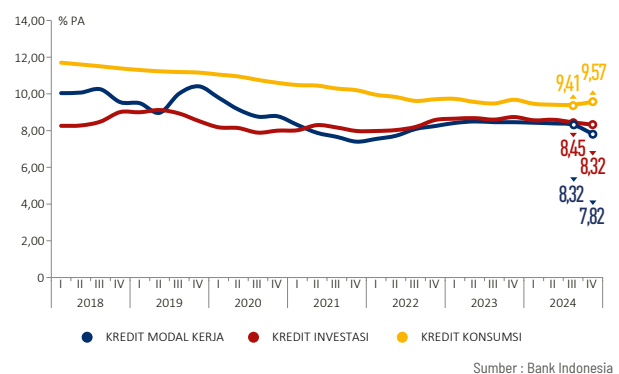


Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada triwulan IV 2024, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,74%. Bank Indonesia tetap menjaga transmisi kebijakan yang *pro growth* dan *pro market* direspon dengan penurunan suku bunga kredit untuk mendukung penyaluran pembiayaan di sektor strategis. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang tercatat masing-masing sebesar 7,82% dan 8,32%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,32% dan 8,45%. Di samping itu, perkembangan suku bunga simpanan (DPK) pada giro dan deposito cenderung meningkat. Rata-rata suku bunga giro dan deposito pada triwulan berjalan masing-



Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

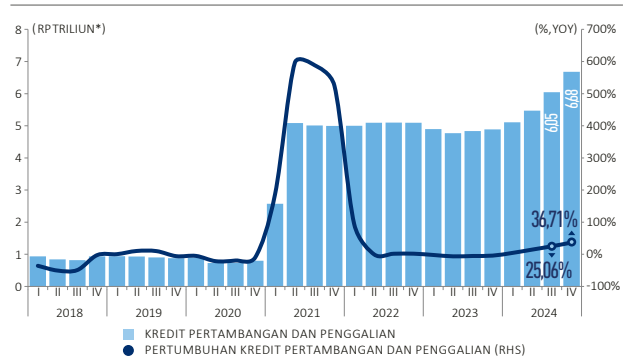


Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit

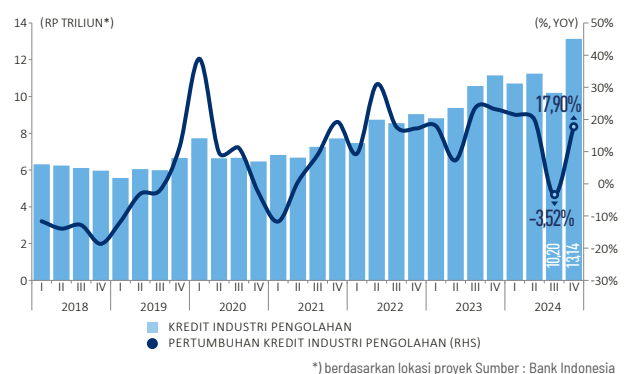
masing tercatat sebesar 2,27% dan 4,49%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,01% dan 4,32%. Sementara suku bunga pada tabungan menurun dari yang sebelumnya 0,60% menjadi 0,59% pada triwulan IV 2024.

Secara sektoral, membaiknya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari kredit industri pengolahan yang tumbuh 17,90%, meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,52% dan LU listrik, gas, dan air yang terakselerasi 36,71% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,06% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri pengolahan sehingga permintaan terhadap penggunaan listrik, gas, dan air meningkat.

Pertumbuhan ini juga diikuti oleh penurunan kredit di beberapa sektor diantaranya LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 21,51% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,59% (yoy). Selain itu, LU Jasa Perorangan RT juga mengalami kontraksi yang lebih dalam pada triwulan IV yaitu sebesar 11,18% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,16% (yoy). Di sisi lain, LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, dan Hiburan termoderasi dibanding triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,25% (yoy) dan 13,33% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,44% (yoy) dan 22,06% (yoy).



Grafik 4.9 Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air



Grafik 4.10 Kredit Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

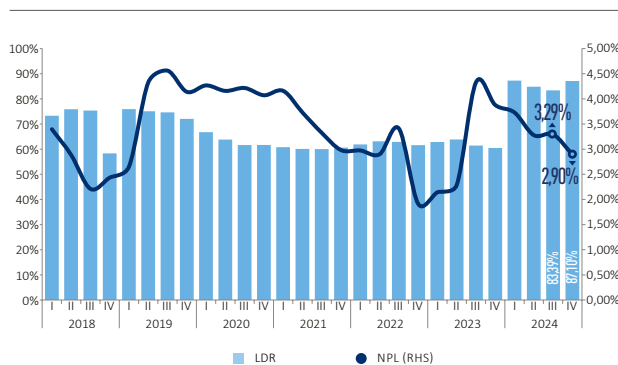
Kabupaten/Kota	Triwulan IV 2024	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	58,58	73,85%
Tanjungpinang	7,41	9,34%
Karimun	4,19	5,28%
Lingga	0,70	0,89%
Natuna	2,66	3,36%
Bintan	5,45	6,87%
Kep. Anambas	0,33	0,42%
Kepulauan Riau	73,32	100,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2024 sebesar Rp58,58 triliun dengan pangsa 73,85% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,34% dari total kredit atau sebesar Rp7,41 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 5,28% dari total kredit atau sebesar Rp4,19 triliun.

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tecermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan menjadi 87,10%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 83,39%. Peningkatan LDR Rupiah lebih disebabkan oleh peningkatan kredit Rupiah yang lebih tinggi yang diiringi oleh turunnya DPK rupiah. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat membaik dari 3,29% menjadi sebesar 2,90% di triwulan IV 2024. Angka NPL ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah di Kepri masih dalam batasan risiko aman, di bawah plafon yang ditetapkan 5%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

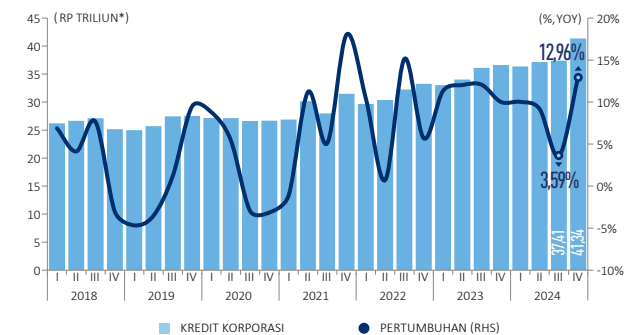
Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Pada triwulan IV terjadi akselerasi kinerja kredit sektor korporasi dan UMKM. Sementara itu kredit sektor rumah tangga masih tumbuh positif namun termoderasi dibanding triwulan sebelumnya.

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan IV 2024. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp41,34 triliun atau tumbuh 12,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,59% (yoy). Di samping itu, risiko kredit korporasi melandai ditandai dengan terkendalinya NPL kredit korporasi menjadi 4,16%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,02%.

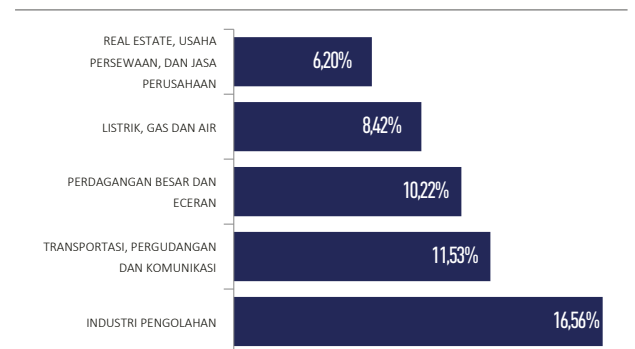
Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 16,56% dari total kredit.

Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (11,53%), LU Perdagangan Besar dan Eceran (10,22%), LU Listrik, Gas, dan Air (8,42%) serta LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (6,20%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan IV 2024 masih < 6%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



Sumber : Bank Indonesia

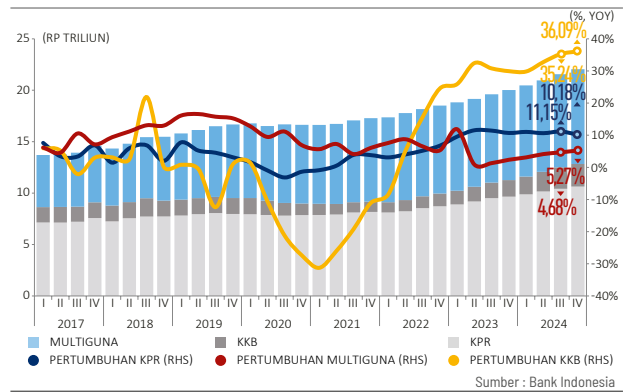
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

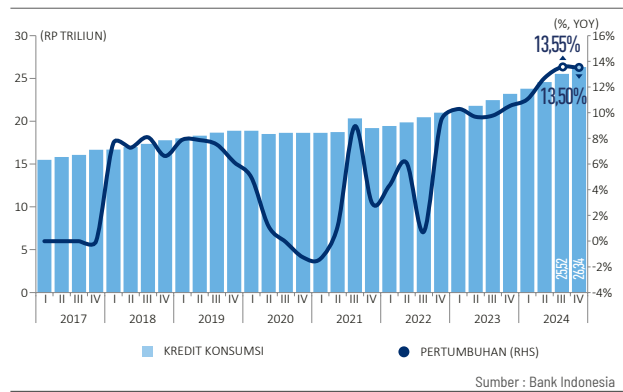
Ketahanan sektor rumah tangga mengalami penurunan sejalan dengan termoderasinya penyaluran kredit rumah tangga dan tingkat konsumsi rumah tangga. Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2024 menjadi sebesar 126,00 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,67. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan tingkat keyakinan yang masih terjaga optimis sebesar 127,19 (>100).

Di tengah tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga di level optimis, penyaluran kredit rumah tangga mengalami peningkatan. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 13,50% (yoy), sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Penurunan didorong oleh Kredit Perumahan Rakyat (KPR), yang termoderasi dari yang sebelumnya tumbuh 11,15% (yoy) menjadi 10,18% (yoy). Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan terjadi pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna yang pada triwulan IV 2024 tumbuh masing-masing sebesar 36,09% (yoy) dan 5,27% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 35,24% (yoy) dan 4,68% (yoy).

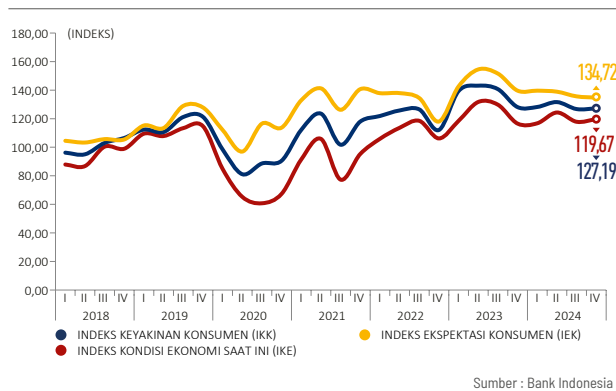
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,20% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,91% (yoy). Deselerasi



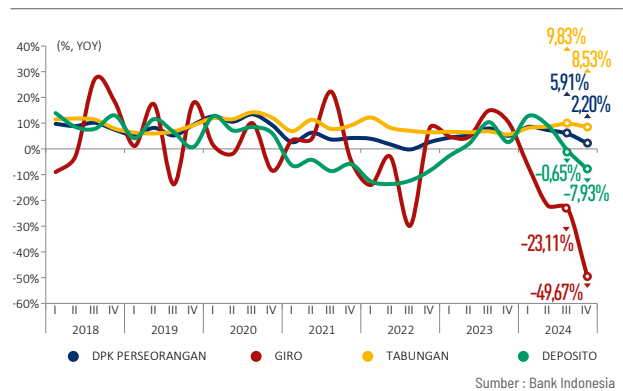
Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga



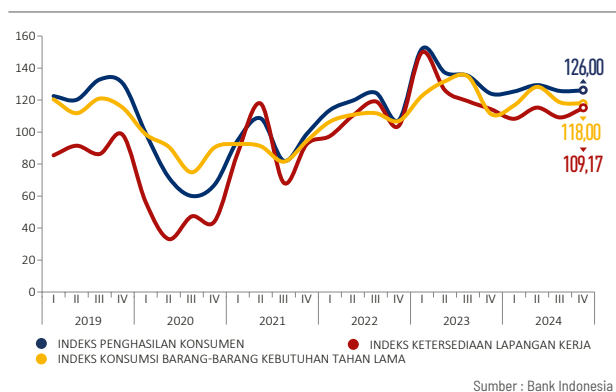
Grafik 4.17 Kredit Konsumsi



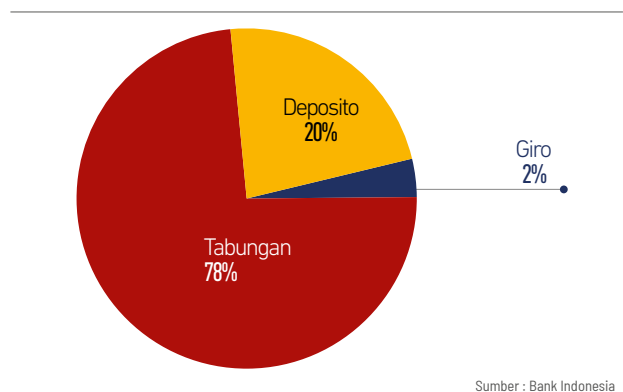
Grafik 4.14 Survei Ekspektasi Konsumen



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.15 Survei Indeks Penghasilan Konsumen



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%

Sumber: Bank Indonesia
(*) berdasarkan lokasi proyek

pertumbuhan DPK perseorangan terjadi terutama karena giro yang berkontraksi lebih dalam dari 23,11%(yoy) menjadi berkontraksi 49,67%(yoy) dan deposito yang juga berkontraksi tajam dari 0,65%(yoy) menjadi berkontraksi 7,93%(yoy) Di samping itu, tabungan juga termoderasi dengan tumbuh sebesar 8,53%(yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,83%(yoy). Pertumbuhan DPK yang secara umum melandai mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang meningkat pada triwulan IV dan upaya masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah meningkatnya harga bahan pokok selaras dengan libur sekolah dan Nataru yang jatuh di triwulan IV 2024. Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 77,57%, diikuti deposito 20,19% dan giro 2,24%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2024 tercatat meningkat namun masih berada dibawah threshold 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 1,67% dari sebelumnya sebesar 1,60% pada triwulan III. Peningkatan NPL terjadi pada seluruh kategori kredit rumah tangga, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 2,08% menjadi 2,11%, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari 0,75% menjadi 0,89%, kredit Peralatan Rumah Tangga dari 1,34% menjadi 1,77%, dan Kredit Multiguna dari 1,37% menjadi 1,41%.

4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

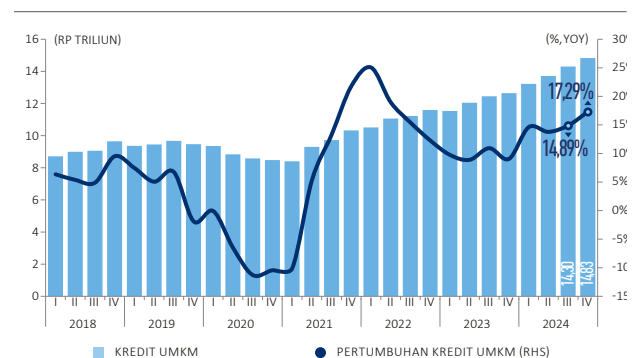
Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh positif dengan risiko kredit yang perlu diwaspadai. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 17,29% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami perbaikan, tecermin dari rasio NPL kredit UMKM yang semula tercatat sebesar 5,14% menjadi 4,90%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 18,70%, turun dari triwulan sebelumnya sebesar 19,24%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut dari waktu ke waktu semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan

Inklusif Makprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih berkontraksi pada LU Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 23,97% (yoy) dan LU Konstruksi yang berkontraksi sebesar 8,26% (yoy).

Peningkatan kredit UMKM pada triwulan IV 2024 didorong oleh LU Listrik, Gas dan Air yang meningkat sebesar 1.663% (yoy) didorong oleh *base effect* diakibatkan pertumbuhan yang tertahan di periode yang sama di tahun 2023 dan tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 186,11% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi tercatat sebesar 80,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,68% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw IV
2024

Rp 526 M



Tw III
2024

Rp 944 M

Outflow Uang Kartal



Tw IV
2024

Rp 3,73 T



Tw III
2024

Rp 2,73 T

Net Flow Uang Kartal



Tw IV
2024

Rp 3,20 T

Net Outflow



Tw III
2024

Rp 1,78 T

Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw IV
2024

Rp 51,38 T

-18,04% (yoy)



Tw III
2024

Rp 52,25 T

13,93% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw IV
2024

Rp 6,86 T

-3,14% (yoy)



Tw III
2024

Rp 6,75 T

4,89% (yoy)

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2024 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp3,20 triliun, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Hal ini mengindikasikan aktivitas perekonomian yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan positif pada sektor perdagangan yang sejalan dengan kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh positif mencapai 5,14% (yoy) pada triwulan IV 2024. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai mengalami peningkatan.

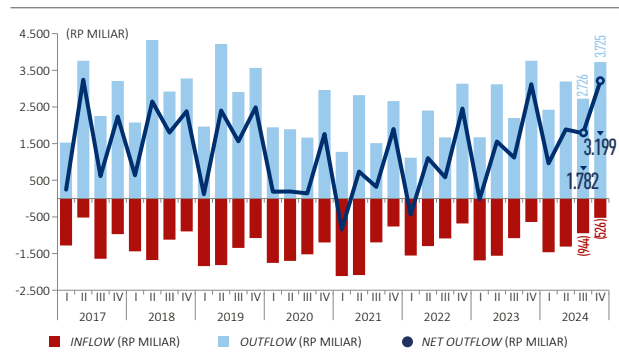
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*/*Outflow*²)

Pada triwulan IV 2024, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,20 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan aliran uang tunai tersebut, kinerja ekonomi Kepri tetap tumbuh positif mendukung pertumbuhan yang positif pada aktivitas perekonomian di Kepri.

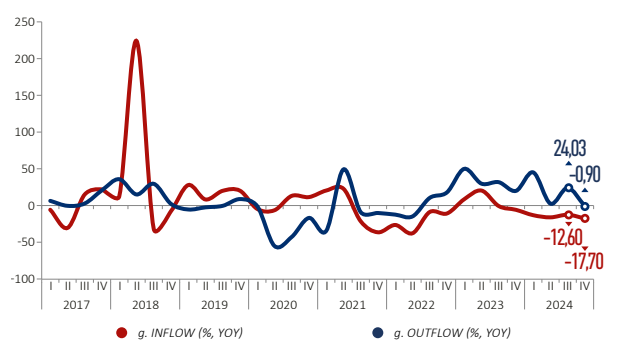
Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2024 berjumlah Rp3,73 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar Rp2,73 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp526 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp944 miliar. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang semakin kuat. Hal ini sejalan dengan akselerasi pada sektor Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mengindikasikan aktivitas perekonomian yang mengalami peningkatan di tengah momen liburan dan HBKN Nataru. Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga masih berdaya tahan dan tumbuh positif meskipun melandai dari triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024.

Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) untuk menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2024, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau terpencil, termasuk Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Sumber : Bank Indonesia

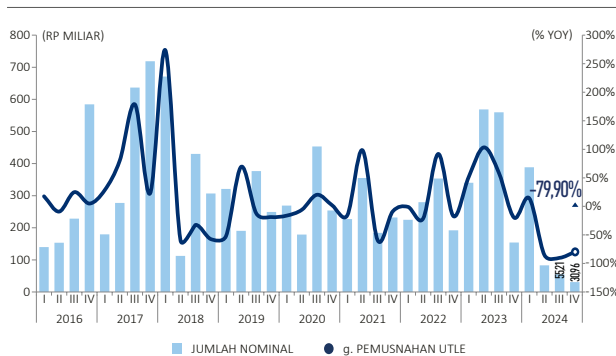
Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan. Proses penyediaan uang kartal layak edar melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, kas keliling, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan IV 2024 tercatat sebanyak Rp31 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp55 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut sejalan dengan penurunan jumlah uang masuk (*inflow*) pada triwulan IV 2024. Hal ini tercermin dari berkurangnya jumlah pecahan uang besar yang dimusnahkan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemusnahan uang kartal yang sudah tidak layak edar mencakup uang yang rusak parah atau telah mencapai akhir masa edarnya. Penurunan pemusnahan uang kartal ini didukung oleh peredaran uang yang lebih terjaga, seiring dengan kampanye nasional CBP Rupiah oleh Bank Indonesia yang masif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepulauan Riau. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

1 Inflow : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2 Outflow : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank

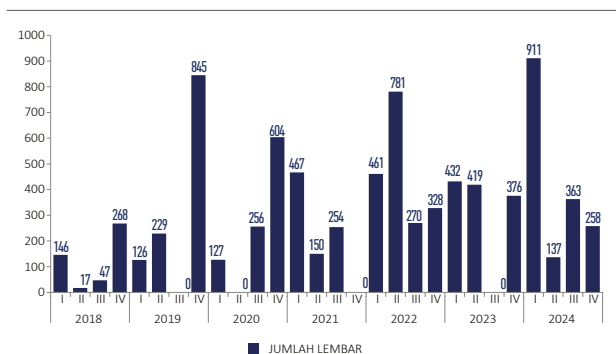


Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2024 terdapat 258 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 363 lembar uang palsu. Adanya temuan UPAL tersebut seiring dengan meningkatnya pelaporan temuan UPAL sejalan dengan konsistensi BI dalam melaksanakan edukasi CBP Rupiah atau diseminasi terkait ancaman hukuman bagi pelaku, atau upaya sejenis dari Bank Indonesia. Dalam hal masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya dan dihimbau untuk melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Laporan



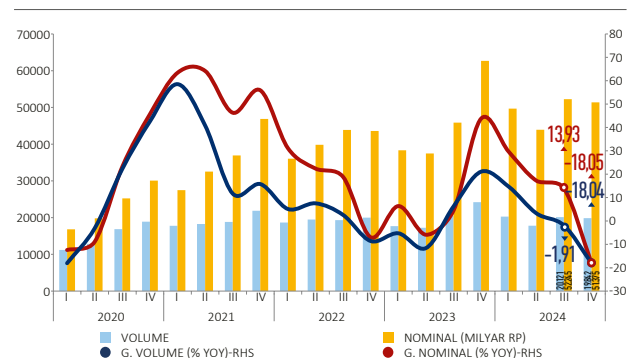
Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Jika uang tersebut dinyatakan tidak asli oleh Bank Indonesia, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

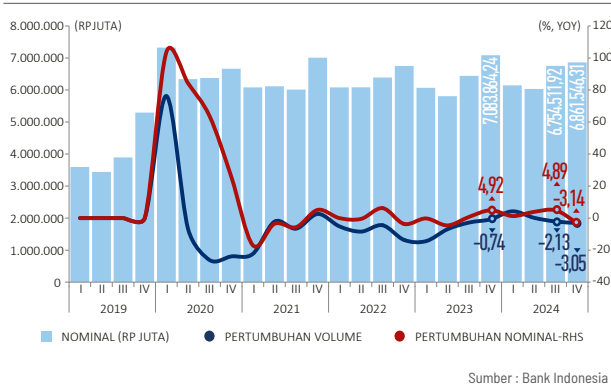
Nominal transaksi sistem Real-Time Gross Settlement (RTGS) triwulan IV 2024 tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat mencapai Rp51,38 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai Rp52,25 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan secara tahunan tercatat mengalami deselerasi jika dibandingkan dengan triwulan III 2024 yakni dari tumbuh 13,93% (yoy) menjadi terkontraksi 18,04% (yoy) pada triwulan IV 2024. Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan IV 2024 terkontraksi sebesar 18,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 terkontraksi sebesar 1,91% (yoy). Tren penurunan transaksi RTGS mengindikasikan adanya perubahan preferensi layanan pembayaran ke alternatif pembayaran lainnya yang tercermin dari peningkatan jumlah volume dan nominal transaksi QRIS yang terakselerasi masing-masing sebesar 110,89% (yoy) dan 117,16% (yoy).



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, yaitu tercatat sebesar Rp6,86 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan nominal transaksi kliring selama triwulan IV 2024 terkontraksi sebesar 3,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode triwulan yang sama pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,92% (yoy) atau sebesar Rp6,86 triliun. Pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 3,05% (yoy)



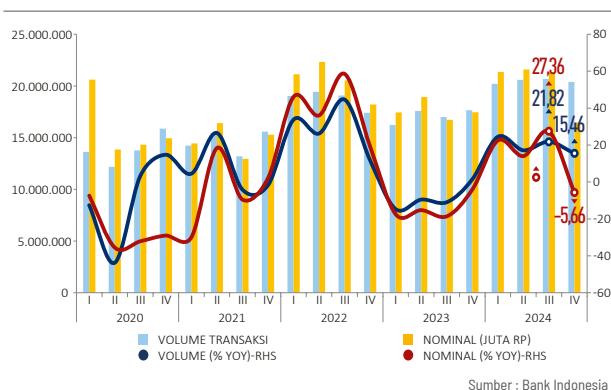
Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

pada triwulan IV 2024, lebih dalam dibandingkan triwulan III 2024 yang berkontraksi sebesar 2,13% (yoy) yang mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi dalam nominal yang besar cenderung menurun di tengah semakin beragamnya layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, sudah ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7.

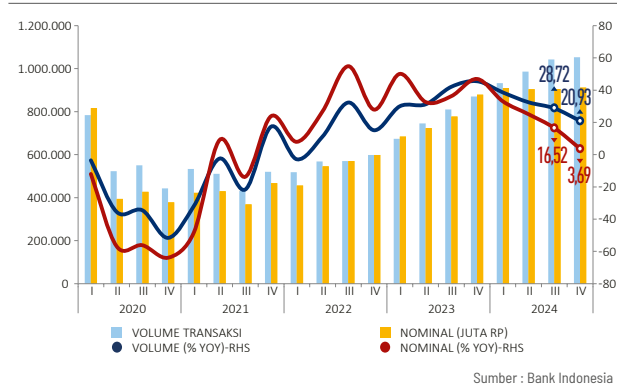
5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2024 mengalami penurunan dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi. Nilai transaksi kartu debit berkontraksi sebesar 5,66% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 27,36% (yoy). Sementara itu, volume transaksi tetap tumbuh positif meski melandai menjadi sebesar 15,46% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,82% (yoy).

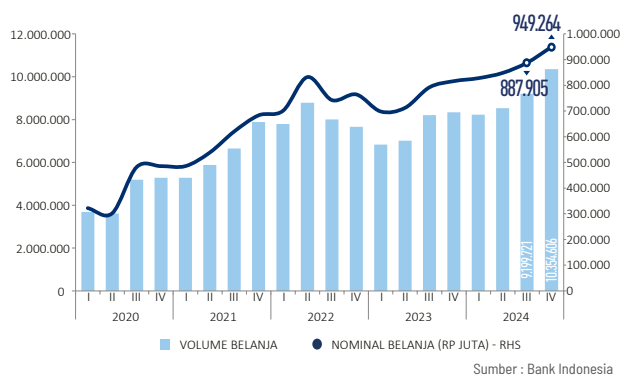
Di sisi lain, volume dan nominal transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2024 tetap kuat meski mengalami perlambatan. Volume transaksi tumbuh sebesar 20,93% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 28,72% (yoy). Selain itu, nominal transaksi juga termoderasi dari 16,52% (yoy) menjadi 3,69% (yoy). Meskipun termoderasi, namun pertumbuhan penggunaan kartu kredit masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.



Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

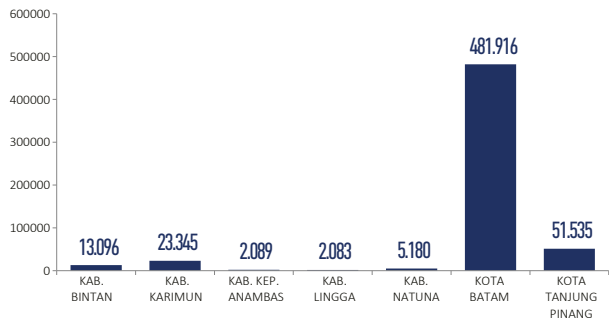
Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat Rp949,26 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp887,91 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

5.2.4 Perkembangan QRIS

Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan IV 2024 tercatat penambahan sebanyak 25.302 pengguna baru atau tumbuh sebesar 5,01% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III 2024, sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri telah mencapai 530.327 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat total transaksi sebanyak 33.977.601 transaksi, tumbuh sebesar 22,32% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,67% (qtq). Nominal total transaksi QRIS di Kepri hingga triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp1,61 triliun atau tumbuh sebesar 22,74% (qtq).

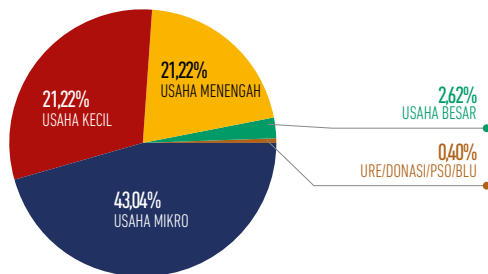
Hingga triwulan IV 2024, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 579.244 merchant, atau tumbuh 14,27% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (83,51%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (8,78%) dan Kab. Karimun (3,91%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 43,72%, diikuti kategori Usaha Kecil (32,04%), dan Usaha Menengah (21,22%).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat lebih dari 97,02% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.



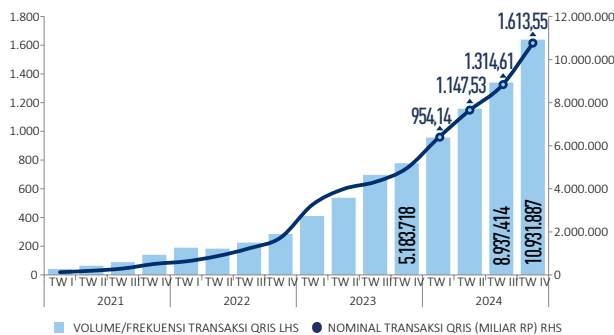
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Berdasarkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan *melting pot* dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, BI Kepri melakukan upaya strategi dalam peningkatan pengguna QRIS seperti sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding QRIS*. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama 2024 hingga triwulan IV antara lain:

1. Sinergi dan kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi *QRIS Cross Border* khususnya pada kawasan wisata.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ *onboarding*/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
 - a. *QRIS Goes to School/Campus*;
 - b. Kolaborasi pada kegiatan/*event* strategis di Kepri;
 - c. Sinergi *event* strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, travel agent, dan objek wisata.
8. *Showcase* dan *QRIS Experience* dalam memperluas transaksi QRIS pada *event* strategis.

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta akselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. BI Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi *event* yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi QRIS khususnya QRIS Antarneagra kepada penggiat wisata melalui asosiasi diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), dan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI). Selain itu, dalam rangka bulan Ramadhan, Bank Indonesia Kepri melaksanakan kegiatan sinergi berupa *On*

Boarding, Sosialisasi, dan QRIS Experience pada berbagai Bazaar Ramadhan dan Operasi Pasar Murah.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS, khususnya QRIS Cross-Border mengingat letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Ke depannya Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan tempat keluar masuk turis mancanegara.

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri memiliki beberapa strategi serta upaya untuk mendorong baik dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang 2024 hingga triwulan IV:

- Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.

- Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk eskalasi isu strategis & mendorong *political will* kepala Daerah.
- Benchmarking* dengan daerah lain.

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran program PKH tahap keempat 2024 secara nominal sebesar Rp24,68 miliar, sedangkan penyaluran kepada KPM sebesar 34.909 KPM. Penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada Desember 2024 adalah sebesar 158.686 penerima dengan persentase penyerapan terhadap penyaluran sebesar 100%. Pembayaran digital menggunakan QRIS pada bansos, moda transportasi umum dan ETPD selalu ditingkatkan sebagai metode pembayaran yang paling mudah dilakukan.

Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 4 tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri

PROVINSI	KAB/KOTA	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	2.985	Rp2.165.957.887	2.985	Rp2.165.957.887	100,00%	100,00%	2.978	99,77%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	80	Rp48.925.000	68	Rp41.150.000	85,00%	84,11%	68	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	5.412	Rp4.035.241.048	5.412	Rp4.035.241.048	100,00%	100,00%	5.381	99,43%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	11	Rp5.900.000	11	Rp5.900.000	100,00%	100,00%	11	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	813	Rp583.199.898	813	Rp583.199.898	100,00%	100,00%	715	87,95%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	5	Rp2.475.000	4	Rp1.875.000	80,00%	75,76%	4	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	18.807	Rp13.168.696.377	18.805	Rp13.167.496.377	99,99%	99,99%	16.597	88,26%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	313	Rp178.200.000	216	Rp119.700.000	69,01%	67,17%	216	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	4.172	Rp2.928.824.315	4.172	Rp2.928.824.315	100,00%	100,00%	3.946	94,58%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	167	Rp110.375.000	149	Rp97.150.000	89,22%	88,02%	149	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	3.551	Rp2.442.766.302	3.551	Rp2.442.766.302	100,00%	100,00%	3.534	99,52%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	13	Rp6.900.000	12	Rp6.525.000	92,31%	94,57%	12	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	1.659	Rp1.138.175.000	1.659	Rp1.138.175.000	100,00%	100,00%	1.416	85,35%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	43	Rp27.400.000	37	Rp23.550.000	86,05%	85,95%	37	100,00%	TUNAI
TOTAL		35.046	24.677.077.939	34.909	24.591.552.939	99,61%	99,65%	32.086	91,91%	

Sumber: Bank Indonesia, diolah (data per Januari 2025)

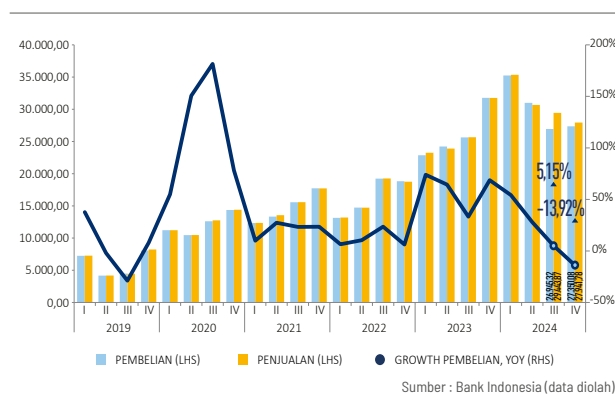
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 65 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2024.

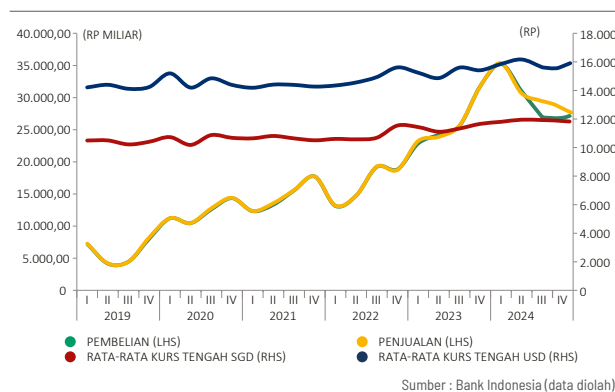
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Kepri pada Triwulan IV 2024 relatif stabil dan tidak ada perubahan jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) jika dibandingkan dengan triwulan III 2024. Jumlah KP dan KC KUPVA BB yakni masing-masing 120 kantor dan 68 kantor, masih sama dengan jumlah pada Triwulan III 2024.

Pada triwulan IV 2024, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 67,43% atau sejumlah Rp36,68 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 19,95% atau sejumlah Rp10,85 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 6,83% atau sejumlah Rp3,72 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,67% atau sejumlah Rp2,54 triliun dan mata uang lainnya sebesar 1,12% atau sejumlah Rp611,27 miliar. Secara umum, total transaksi UKA pada Triwulan IV 2024 setara dengan Rp54,40 triliun, terkontraksi sebesar 3,52% (qoq) atau menurun setara dengan Rp1,99 triliun dibandingkan triwulan III 2024.



Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi KUPVA

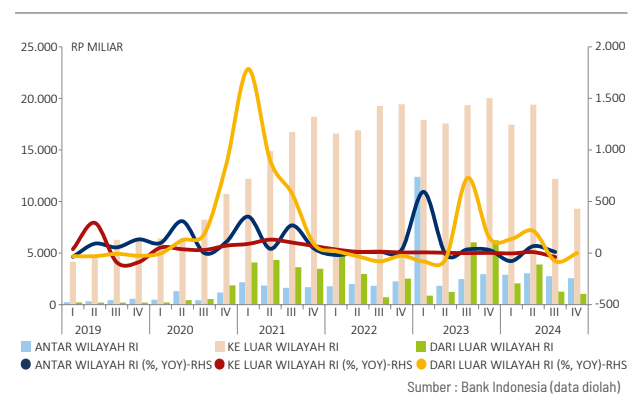


Grafik 5.15 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 71,96%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 19,91%, dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 8,13%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana ke luar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, terdapat 16 (enam belas) izin pembukaan kantor pusat KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi yang telah diberikan dan terdapat 7 (tujuh) proses perizinan KUPVA BB dan Layanan Remitansi sedang berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa industri KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tidak mengalami peningkatan, masih sejumlah 65 Penyelenggara sama dengan triwulan III 2024. Dari frekuensi dan volume nominal transaksi, baik transaksi *outgoing*, *incoming* dan domestik mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi *outgoing* mengalami terkontraksi 53,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang terkontraksi 37,03% (yoy). Transaksi *incoming* mengalami terkontraksi 83,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang terkontraksi 79,04%. Transaksi domestik juga mengalami penurunan, terkontraksi 12,69% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2024 yang tumbuh 11,49% (yoy). Secara umum, pada triwulan IV 2024 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri tercatat menurun, terkontraksi sebesar 55,72% (yoy) menjadi sebesar Rp12,93 triliun dari sebesar Rp16,22 triliun pada triwulan III 2024.



Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

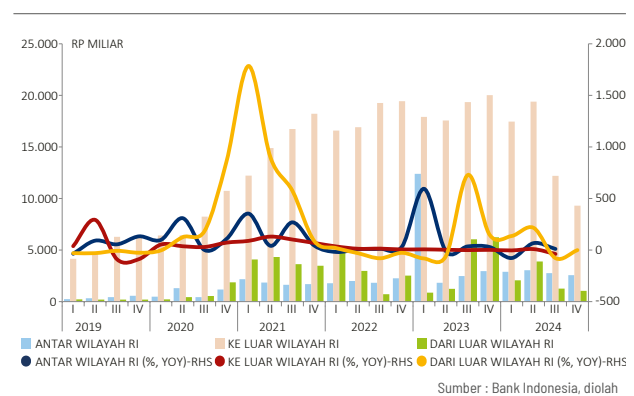
5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri (KPw BI Provinsi Kepri) secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah dilakukan edukasi pelindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital sebanyak 101 kali kegiatan. Edukasi pelindungan konsumen ini melibatkan 30.017 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis-kuis yang terfokus pada edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen seperti pelindungan data pribadi, tips & trik aman bertransaksi, dan langkah-langkah untuk menghindari modus penipuan digital. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media sosial secara efektif untuk mensosialisasikan informasi penting terkait pelindungan konsumen, mencatat 48.397 keterlibatan melalui kanal Instagram dan 2.468 di kanal Tiktok KPw BI Provinsi Kepri. Kegiatan ini mencakup edukasi mengenai pelindungan data pribadi, serta cara-cara menghindari berbagai modus penipuan digital seperti *phishing*, *skimming*, dan *social fraud engineering*.

KPw BI Provinsi Kepri memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi keuangan inklusif dan pelindungan konsumen kepada sebanyak 225 peserta. Dalam rangka memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif pelindungan konsumen, KPw BI Provinsi Kepri melakukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak seperti

Pemerintah Daerah (Provinsi & Kota) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program edukasi. Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen – Sistem Pembayaran (IKK-SP), IKK-SP Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 66,62% menjelaskan bahwa konsumen telah mampu dan berani menyampaikan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebihan atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya.

Sepanjang tahun 2024, KPw BI Provinsi Kepri telah menerima 13 (tiga belas) surat pengaduan terkait berbagai isu konsumen, khususnya yang berkaitan dengan transaksi digital dan telah berhasil ditindaklanjuti dengan baik. Penanganan yang dilakukan juga meliputi koordinasi dengan perbankan dan OJK serta memberikan edukasi pelindungan data diri kepada konsumen.



Grafik 5.17 Jumlah Pengaduan



BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus 2024
1.120.660
Jiwa



Agustus 2023
1.093.686
Jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus 2024
67,14%



Agustus 2023
67,68%

Tingkat Pengangguran Terbuka

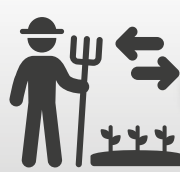


Agustus 2024
6,39%



Agustus 2023
6,80%

Nilai Tukar Petani



Tw III 2024
104,04



Tw II 2024
105,25

Tingkat Kemiskinan



September 2024
4,78%



Maret 2024
5,37%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun 2024
79,89



Tahun 2023
79,08

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode					Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Ags'24	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	1.120.660	26.974	2,47%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.049.090	29.734	2,92%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	71.570	(2.760)	-3,71%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%	6,39%		-6,03%
- Perdesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%	2,50%		-64,29%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%	6,74%		-0,44%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%	69,17%		

Sumber: BPS (data diolah)

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ yang menurun. TPT pada Agustus 2024 berada pada level 6,39%, menurun dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat 6,80%. Perbaikan kondisi tersebut utamanya terjadi di pedesaan yang mengalami penurunan TPT dari 7,00% pada Agustus 2023 menjadi 2,50% pada Agustus 2024. Perbaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut didorong oleh pertumbuhan positif sektor industri yang terus menyerap tenaga kerja. Selain itu, masifnya proyek investasi di Kepri turut mendukung peningkatan kesempatan kerja, sehingga berkontribusi pada penurunan TPT.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan untuk level pendidikan SMA dan SMK mengalami penurunan, sedangkan untuk level ≤SD, SMP dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) mengalami peningkatan. TPT kelompok pendidikan SMA dan SMK mengalami perubahan masing-masing dari 7,85% dan 9,99% pada Agustus 2023 menjadi 7,80% dan 6,83% pada Agustus 2024. Sementara kelompok pendidikan ≤SD, SMP, diploma dan universitas

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran						
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23	Aug'24
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%	5,48%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%	6,26%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%	7,80%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%	6,83%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%	5,32%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%	4,36%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23	Agt'24
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%	23,65%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%	16,59%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%	5,76%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%	8,03%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%	7,08%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%	10,82%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%	6,46%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%	1,36%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%	5,26%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%	2,15%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,83	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	17,42	-2,75
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,16	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	6,06	0,43
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,27	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	4,29	0,52
4	Buruh/karyawan	64,95	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	64,16	1,60
5	Pekerja Bebas	3,30	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	2,30	0,59
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	4,50	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	5,77	-0,40
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	

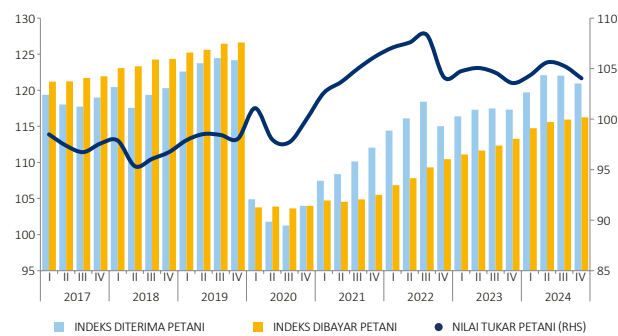
Sumber: BPS (diolah)

persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok buruh/karyawan, pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,60 persen poin, 0,59 persen poin, 0,52 persen poin dan 0,43 persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

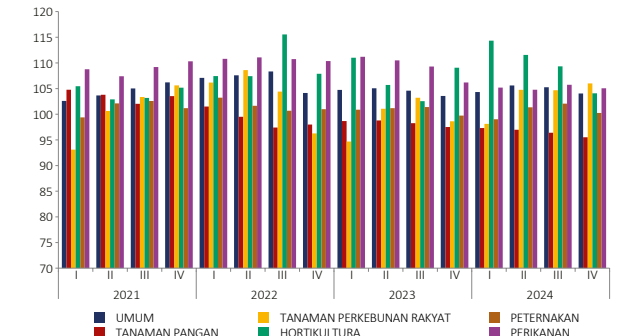
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2024 yang merupakan rata-



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100															
	2021				2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Tanaman Pangan																
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51
2. Hortikultura																
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07
3. Tanaman Perkebunan Rakyat																
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00
4. Peternakan																
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26
5. Perikanan																
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06
Umum																
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04

Sumber: BPS (data diolah)

rata bulan Oktober-Desember 2024 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya (Juli-September 2024). Rata-rata NTP pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 104,04, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,25. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan turunnya Indeks yang Diterima (It) petani di subsektor Holtikultura, Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan.

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 106, dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 95,51. Selain itu terjadi penurunan yang cukup signifikan pada sub Kelompok Holtikultura yang selama ini merupakan NTP tertinggi. NTP Holtikultura tercatat sebesar 104,07 pada triwulan IV 2024, menurun dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 109,34.

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2024 tercatat sebanyak 124.960 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 138.300 orang. Pada periode September 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp787.211/bulan/kapita pada Maret 2024 menjadi Rp807.602/bulan/kapita pada September 2024. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2024 tercatat sebesar 0,635%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2024 sebesar 0,704%. Penurunan

indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2024 juga mengalami penurunan dari 0,146% pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,143% pada September 2024.

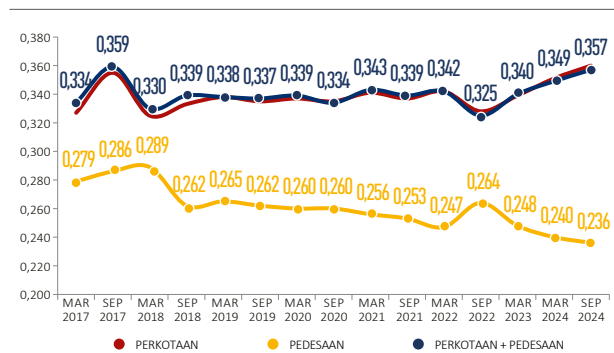
6.2.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio² Provinsi Kepri pada September 2024 tercatat sebesar 0,357, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,349. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan pemburukan ditandai dengan kesenjangan yang meluas pada periode Maret 2024 – September 2024. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,360, meningkat dari Maret 2024 tercatat sebesar 0,351, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,236, menurun dari Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di perdesaan mengalami perbaikan, sedangkan ketimpangan di perkotaan sedikit meningkat. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang tertinggi, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional (0,381).

Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

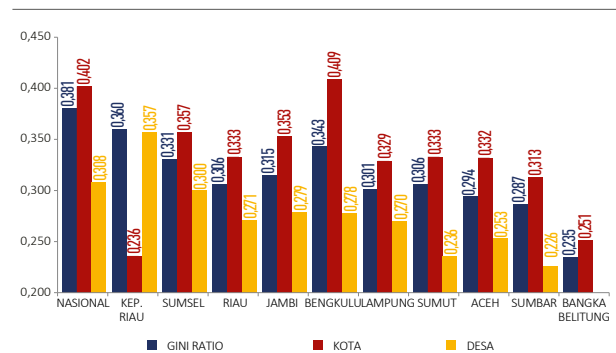
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,228	0,313	0,243	0,107	0,130	0,18	0,290	0,423	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Sumber: BPS (data diolah)

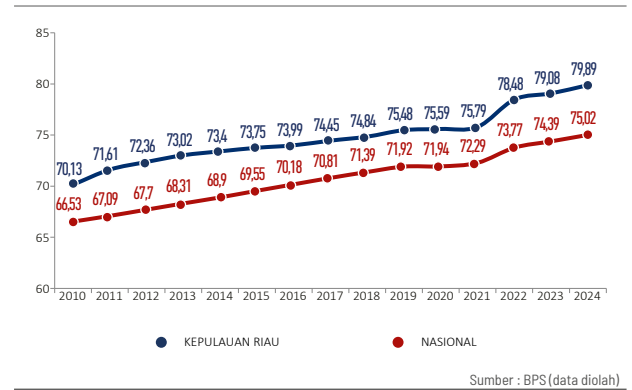
Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

2 Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat sebesar 79,89, meningkat 0,81 poin (1,01%) dibandingkan tahun sebelumnya 79,08. Peningkatan IPM Kepri 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023.

Angka UHH penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat 75,12 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,90 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,27 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,50 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.573.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.998.000,-.



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,32 dan 81,58. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu Rupiah)	Rp 000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

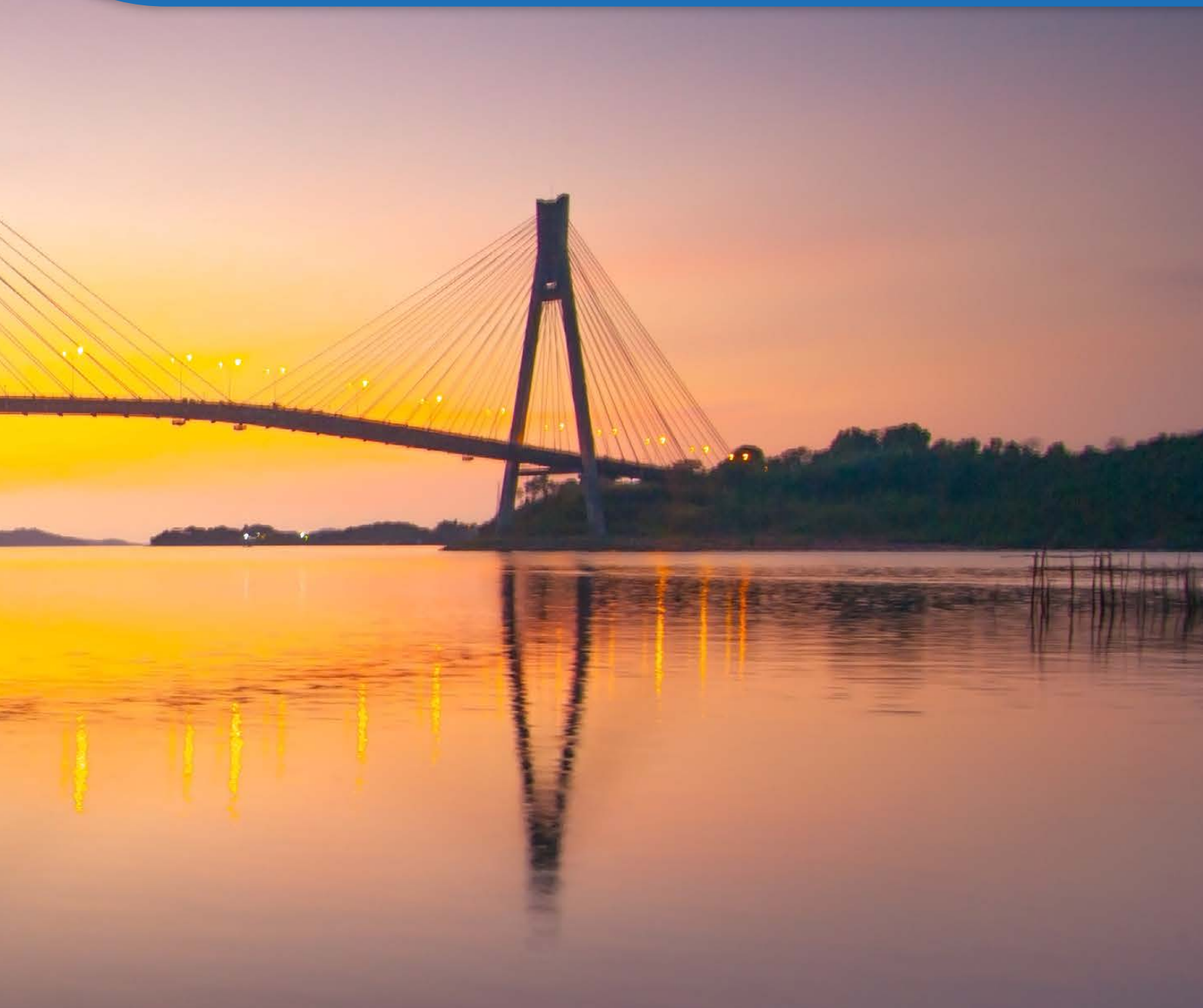
BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan tetap tumbuh stabil, meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tetap kuat mampu menjadi faktor pendorong perekonomian global. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

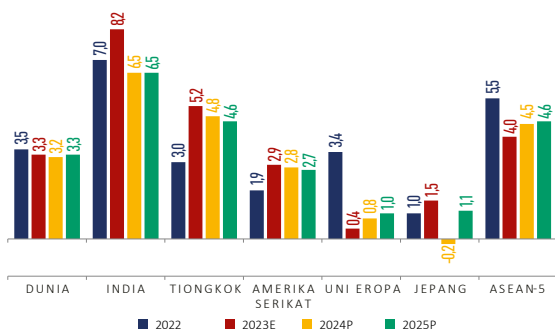


7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian global diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,1% dibandingkan prakiraan sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (*advanced economies*) khususnya AS, di tengah proyeksi untuk negara *emerging market and developing economies* yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat didukung oleh konsumsi yang masih kuat. Di sisi lain, perlambatan konsumsi domestik di Tiongkok, penurunan aktivitas industri di India, disrupsi *supply* di Jepang, hingga pelemahan industri manufaktur dan ekspor komoditas di Eropa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 diperkirakan masih tetap kuat sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,5% (yoy).

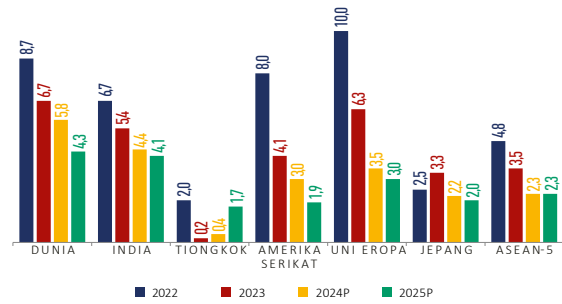
Tekanan inflasi global diperkirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diperkirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yoy) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh prakiraan peningkatan investasi, khususnya investasi non bangunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong sehingga dapat semakin menopang permintaan domestik. Adapun dari sisi eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama.



Sumber : IMF World Economic Outlook, Januari 2025

Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% , yoy)

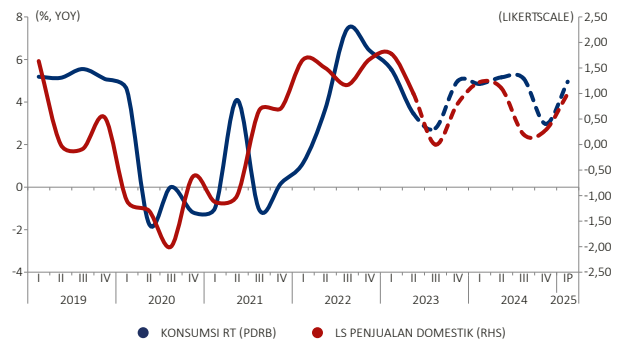


Sumber : IMF World Economic Outlook, Januari 2025

Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% , yoy)

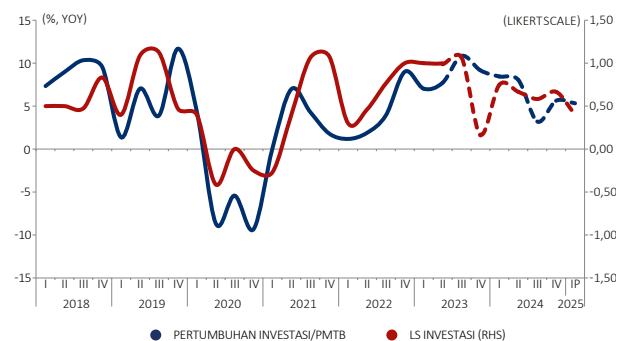
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh kinerja domestik yang membaik, ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepri. Selain itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2025 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,6% (yoy).



*) prakiraan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.3 Likert Scale Prakiraan Penjualan Ekspor



*) prakiraan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.4 Likert Scale Prakiraan Investasi

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman.	▲
Investasi	Berakhirnya tahun politik diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga tidak lagi bersikap <i>wait and see</i> .	▲
Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama <i>Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ)</i> meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	▼
Transisi Pemerintahan AS	Transisi pemerintahan AS sebagai mitra dagang utama perlu dicermati, khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupsi terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung *wait and see* pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.
3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
4. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat.
5. Impelementasi tarif oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku impor dan pangan

7.2 PROSPEK INFLASI

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. **Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:**
 - a. Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
 - b. Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri,

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	• Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. • Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. • Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. • Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. • Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat. • Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi.
<i>Downside Risk</i>	• Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. • Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan. • Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. • Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik.

- c. Mendukung peningkatan *comparative advantage* daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.

2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:

- a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan *event*, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*.
 - b. Mendukung implementasi kebijakan *short term visa* guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
 - c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
 4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
 5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi *merchant* dan *user* QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS *cross border*.
 6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
 7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.



Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
MAKRO												
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94	110,31
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23	106,32
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93	105,23
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79	101,60
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91	104,11
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86	112,86
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03	99,97
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45	102,08
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15	102,23
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87	103,02
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,85	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53	114,87
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02	5,14
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	3,38	3,92	4,28	3,82	4,13	3,56	3,65	3,66	3,62	3,88	4,15	4,47
Impor Non Migas (Juta USD**)	3,23	3,25	3,75	3,55	3,95	3,71	3,66	3,20	3,20	3,00	3,78	4,03
PERBANKAN												
Giro (Rp miliar)	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876	34.257
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225	38.865
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040	17.950
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141	91.072
Total Asset (Rp miliar)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.479	105.336
Total Kredit (Rp miliar)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336	79.322
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%	8,59%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,30%	4,23%	4,20%	4,28%	4,46%
LDR (%) - Lokasi Proyek	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%	87,10%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%
SISTEM PEMBAYARAN												
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944	526
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726	3.725
Volume Kliring (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262	82.216
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866	4.167.192	3.366.996	3.374.095	3.731.188	3.987.954

Sumber: BPS dan BI
Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100
**) Data Sangat Sementara
***) data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 **Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)**
Provinsi Kepulauan Riau
Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Sep 2023		Des 2023		Mar 2024		Jun 2024		Sep 2024		Des 2024	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm
UMUM		114,66	0,16	116,42	0,44	105,94	0,46	106,69	0,28	106,32	0,14	107,35	0,68
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	124,85	(0,07)	107,66	0,82	109,16	0,32	110,36	0,56	107,94	0,10	110,31	2,05
a.	MAKANAN	120,80	(0,23)	106,69	0,97	108,32	0,31	109,50	0,54	106,33	(0,05)	108,85	2,40
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	111,76	0,14	106,26	0,05	106,73	0,00	107,58	0,49	108,11	0,75	109,27	0,28
c.	MINUMAN BERALKOHOL	101,31	0,00	102,71	0,91	101,81	0,00	102,32	0,00	103,06	0,02	103,06	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	163,63	0,63	117,91	0,46	119,00	0,01	120,64	0,68	122,93	0,86	124,90	0,57
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	110,68	0,19	104,12	0,32	105,34	0,05	106,15	(0,08)	106,23	0,00	106,32	-0,14
a.	PAKAIAN	111,74	0,25	104,36	0,21	104,57	0,01	106,01	0,04	106,07	0,01	106,15	-0,16
B.	ALAS KAKI	106,59	(0,04)	103,23	0,76	108,29	0,04	106,71	(0,54)	106,87	0,00	106,98	-0,07
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	104,52	0,11	102,51	0,07	102,89	0,01	103,00	0,01	104,93	0,18	105,23	0,03
a.	SEWA RUMAH	106,62	0,28	105,14	0,00	105,26	0,00	105,51	0,00	106,28	0,36	106,56	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	105,48	0,00	101,40	0,01	102,13	0,01	102,30	0,12	102,57	0,03	103,43	0,02
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,06	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103,22	0,00	100,96	0,21	101,57	-	101,57	0,00	105,55	0,09	105,78	0,08
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	110,62	(0,07)	101,82	0,05	102,11	(0,01)	101,79	0,00	101,79	0,08	101,60	-0,05
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	103,95	0,00	101,92	0,00	102,01	0,00	102,10	0,00	102,16	0,05	102,25	0,09
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	103,43	0,00	103,17	0,51	103,17	0,00	103,17	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	106,94	(0,10)	100,57	0,44	100,69	0,00	100,88	0,56	101,03	0,01	101,16	0,02
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	97,32	0,00	98,72	0,00	99,25	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	106,26	0,00	102,23	0,00	103,10	0,00	103,04	(0,09)	104,25	0,14	104,27	0,02
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	117,73	(0,11)	102,41	(0,09)	102,76	(0,01)	101,95	(0,18)	101,82	0,11	101,41	-0,12
V.	KESEHATAN	103,69	0,04	99,88	0,04	103,72	0,01	103,82	0,03	103,91	(0,01)	104,11	0,12
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	105,48	0,09	99,68	0,08	101,97	0,01	102,06	0,05	102,23	(0,02)	102,49	0,23
b.	JASA RAWAT JALAN	100,49	0,00	100,15	0,00	101,61	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00	102,16	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	100,00	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	126,61	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00
VI.	TRANSPORTASI	116,87	0,09	110,51	0,87	110,79	0,02	111,56	0,71	111,86	0,11	112,86	0,53
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	108,98	0,00	101,95	0,00	102,75	0,01	102,94	0,14	104,60	0,02	104,81	0,05
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	116,45	0,76	110,95	(0,03)	113,65	0,01	113,71	0,01	113,73	(0,25)	113,33	0,04
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	124,87	(1,30)	117,25	3,45	111,25	(0,00)	114,25	2,94	113,55	0,61	118,19	1,68
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	132,81	0,00	106,50	0,00	107,43	0,00	107,43	0,00	116,04	8,01	122,90	6,44
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,25	0,14	100,07	0,06	100,06	(0,00)	100,03	0,00	100,03	0,00	99,97	0,00
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	97,02	(0,04)	100,04	0,00	99,96	(0,00)	99,85	0,00	99,85	0,00	99,57	-0,02
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,29	0,21	100,09	0,08	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	95,75	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VIII	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	108,27	0,00	101,69	0,04	101,25	(0,01)	101,28	(0,01)	101,45	(0,06)	102,08	0,00
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	102,72	0,00	100,07	0,00	100,10	0,00	100,22	0,07	100,33	0,01	100,37	0,00
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,19	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	121,55	0,00	109,62	0,00	109,62	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	112,59	0,00	103,07	0,07	101,96	(0,01)	101,75	(0,09)	102,07	(0,16)	103,60	-0,01
IX	PENDIDIKAN	120,63	1,54	104,15	0,00	104,19	0,00	104,19	0,00	102,15	0,85	102,23	0,00
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	120,89	0,00	103,12	0,00	103,27	0,00	103,27	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	114,75	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	130,07	5,47	108,44	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	111,10	2,45	111,10	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	111,88	0,00	101,49	0,00	101,57	0,00	101,57	0,00	102,40	0,00	102,87	0,00
X	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	110,76	0,32	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	110,76	0,32	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02
XI	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	123,31	0,32	106,83	0,64	108,30	0,06	111,06	0,13	112,53	0,07	114,87	0,11
a.	PERAWATAN PRIBADI	118,49	0,13	105,31	0,10	105,42	(0,00)	105,58	0,17	105,61	0,12	106,15	0,09
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	134,42	0,66	110,89	1,60	115,53	0,06	124,65	0,06	129,45	(0,02)	135,60	-0,35
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	107,25	0,00	105,91	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00
d.	JASA LAINNYA	108,19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	108,79	8,79

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%	0,68%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%	0,70%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%	0,64%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%	0,68%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%	0,44%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2023							2024											
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	85.971	87.846	88.576	90.402	92.995	93.835	92.850	92.330	94.529	100.684	97.499	97.690	100.447	101.001	101.656	103.479	105.054	105.646	105.336
DANA PIHAK KETIGA	72.106	72.970	74.955	76.915	76.915	81.085	79.799	79.946	81.684	82.197	82.197	84.010	83.798	86.701	87.575	89.141	90.745	90.467	91.072
a. Giro	24.908	25.490	27.105	27.926	27.926	29.286	29.153	28.958	30.767	30.605	30.605	31.543	30.484	32.555	32.770	33.876	34.262	34.009	34.257
b. Tabungan	32.626	32.906	33.103	33.304	33.304	33.889	34.340	35.173	34.984	35.705	35.705	36.399	36.858	37.951	37.773	38.225	38.805	38.930	38.865
c. Deposito	14.571	14.574	14.747	15.685	15.685	17.910	16.305	15.814	15.933	15.888	15.888	16.068	16.456	16.195	17.032	17.040	17.677	17.529	17.950
KREDIT																			
a. Jenis Penggunaan	67.327	68.074	74.655	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322
Modal Kerja	23.405	23.210	27.181	23.863	24.219	24.251	23.759	23.260	23.431	23.086	23.506	23.625	24.143	20.329	20.169	20.254	20.185	20.875	22.687
Investasi	22.124	22.870	24.123	23.794	24.158	24.003	24.544	24.562	24.510	24.826	25.083	25.198	24.980	28.566	28.198	28.563	30.148	29.929	30.300
Konsumsi	21.798	21.994	23.352	22.474	22.676	22.972	23.203	23.339	23.488	23.806	24.028	24.257	24.566	24.905	25.220	25.519	25.893	26.097	26.335
b. Jenis Kredit	67.327	68.074	74.655	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322
UMKM	12.031	11.895	13.318	12.449	12.604	12.714	12.646	12.588	12.778	13.224	13.070	13.387	13.711	13.848	13.902	14.302	14.504	14.447	14.832
Non UMKM	55.296	56.179	61.337	57.683	58.449	58.513	58.861	58.573	58.651	58.493	59.547	59.692	59.977	59.952	59.685	60.034	61.722	62.454	64.490
c. Kolektibilitas	67.327	68.074	68.657	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322
Lancar	61.376	62.354	63.079	65.188	65.685	65.642	66.528	62.018	62.281	63.049	63.791	64.453	65.380	65.624	66.169	67.510	69.439	70.179	73.015
D.P.Khusus	4.324	3.113	2.957	2.378	2.720	2.980	2.277	6.418	6.423	5.994	6.117	5.953	5.892	5.718	4.977	4.377	4.306	4.355	4.010
Kurang Lancar	357	1.284	1.285	214	192	213	353	398	353	160	153	142	118	163	217	201	161	155	107
Diragukan	563	572	532	1.496	1.592	552	519	197	261	450	125	160	194	150	144	216	256	207	139
Macet	706	751	804	856	864	1.840	1.829	2.130	2.111	2.065	2.432	2.372	2.104	2.144	2.079	2.033	2.065	2.004	2.051
RATIO																			
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,37%	93,29%	91,60%	91,18%	92,38%	87,84%	89,61%	89,01%	87,45%	87,25%	88,35%	86,99%	87,94%	85,12%	84,03%	83,39%	84,00%	85,00%	87,10%
b. Non Performing Loans (NPL)	2,42%	3,83%	3,82%	3,66%	3,73%	3,66%	3,78%	3,83%	3,81%	3,73%	3,73%	3,66%	3,28%	3,33%	3,32%	3,29%	3,26%	3,08%	2,90%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2023							2024											
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	18.728	19.682	19.609	19.834	20.215	20.012	20.087	19.676	21.195	21.316	22.069	20.758	21.516	21.799	21.535	22.594	24.080	105.646	105.336
DANA PIHAK KETIGA	14.145	14.045	14.625	16.156	13.323	17.395	19.866	19.842	20.781	20.859	21.564	20.541	21.398	22.114	22.112	23.210	23.715	23.297	23.554
a. Giro	5.113	5.026	6.227	6.855	5.859	6.783	7.034	6.701	8.024	7.885	8.502	7.202	7.932	8.696	8.472	9.513	9.931	9.447	9.738
b. Tabungan	6.945	7.043	7.413	7.042	6.574	6.793	9.279	10.300	9.713	9.899	9.975	10.287	10.379	10.378	10.292	10.355	10.429	10.542	10.638
c. Deposito	2.087	1.976	985	2.259	890	3.820	3.554	2.841	3.044	3.075	3.088	3.052	3.087	3.041	3.348	3.342	3.356	3.308	3.178
KREDIT																			
a. Jenis Penggunaan	15.845	15.654	16.918	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740
Modal Kerja	3.879	3.745	4.081	3.819	3.945	3.922	3.898	3.757	3.789	3.823	3.805	3.787	3.764	3.793	3.864	3.922	4.115	4.806	4.810
Investasi	4.324	4.224	4.799	4.590	4.665	4.626	5.440	5.460	5.499	5.483	5.499	5.502	5.473	5.627	5.926	6.233	7.274	7.131	7.170
Konsumsi	7.643	7.685	8.039	7.817	7.855	7.938	7.978	8.036	8.093	8.179	8.206	8.266	8.348	8.445	8.487	8.576	8.658	8.707	8.760
b. Jenis Kredit	15.845	15.654	16.918	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740
UMKM	3.884	3.916	4.305	4.124	4.183	4.201	4.191	4.074	4.142	4.188	4.146	4.216	4.229	4.252	4.251	4.447	4.489	4.454	4.558
Non UMKM	11.962	11.738	12.614	12.101	12.282	12.285	13.125	13.179	13.239	13.297	13.365	13.340	13.355	13.614	14.026	14.284	15.557	16.191	16.182
c. Kolektibilitas	15.845	15.654	15.889	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740
Lancar	14.354	14.293	14.583	14.921	15.075	15.184	16.125	15.891	16.014	16.189	16.179	16.242	16.282	16.573	16.960	17.410	18.739	19.333	19.555
D.P.Khusus	666	567	513	559	608	558	538	718	716	612	655	645	615	604	586	600	591	602	494
Kurang Lancar	194	162	156	112	110	110	31	75	57	83	81	64	40	41	77	29	42	37	39
Diragukan	457	451	407	374	405	402	399	36	69	73	47	79	99	66	53	92	83	48	42
Macet	174	180	229	259	267	231	223	533	526	528	549	526	548	582	599	600	592	623	609
RATIO																			
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	112,02%	111,46%	115,68%	100,43%	123,58%	94,77%	87,16%	86,95%	83,64%	83,83%	81,20%	85,47%	82,17%	80,79%	82,66%	80,70%	84,53%	88,61%	88,05%
b. Non Performing Loans (NPL)	5,20%	5,07%	4,99%	4,59%	4,75%	4,51%	3,78%	3,73%	3,75%	3,91%	3,86%	3,81%	3,91%	3,86%	4,00%	3,85%	3,58%	3,43%	3,33%

Sumber: Bank Indonesia
**) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Kota Batam

KETERANGAN	2023				2024											
	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	70.569	72.780	73.822	72.763	72.655	73.334	79.369	75.430	76.932	78.931	78.540	79.201	80.121	80.885	81.657	80.974
DANA PIHAK KETIGA	60.759	63.592	63.690	59.932	60.104	60.903	61.338	62.446	63.781	65.445	64.587	65.463	65.932	67.029	67.170	67.518
a. Giro	21.071	22.067	22.503	22.120	22.257	22.743	22.720	23.041	23.479	24.598	23.859	24.298	24.364	24.332	24.562	24.519
b. Tabungan	26.263	26.730	27.096	25.062	24.874	25.271	25.806	26.424	26.931	27.502	27.573	27.481	27.870	28.376	28.387	28.227
c. Deposito	13.425	14.795	14.091	12.751	12.973	12.889	12.813	12.981	13.372	13.346	13.155	13.684	13.698	14.322	14.221	14.772
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582
Modal Kerja	20.045	20.274	20.330	19.861	19.503	19.642	19.263	19.701	19.837	20.379	16.535	16.306	16.332	16.070	16.069	17.877
Investasi	19.204	19.493	19.377	19.104	19.102	19.011	19.342	19.584	19.696	19.507	22.939	22.272	22.330	22.874	22.798	23.130
Konsumsi	14.658	14.821	15.034	15.226	15.303	15.394	15.627	15.822	15.990	16.218	16.460	16.733	16.943	17.235	17.390	17.575
b. Jenis Kredit	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582
UMKM	8.324	8.422	8.513	8.455	8.515	8.635	9.036	8.925	9.171	9.482	9.596	9.651	9.856	10.014	9.993	10.274
Non UMKM	45.582	46.166	46.228	45.735	45.393	45.412	45.196	46.182	46.352	46.622	46.338	45.659	45.749	46.165	46.263	48.308
c. Kolektibilitas	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582
Lancar	50.267	50.610	50.458	50.403	46.127	46.268	46.860	47.612	48.211	49.098	49.051	49.209	50.100	50.700	50.845	53.460
D.P.Khusus	1.819	2.113	2.422	1.739	5.700	5.707	5.381	5.461	5.307	5.277	5.115	4.391	3.777	3.715	3.752	3.516
Kurang Lancar	102	82	103	321	322	296	77	72	78	78	122	140	172	118	118	68
Diragukan	1.122	1.186	150	120	161	192	377	78	81	94	85	91	124	173	159	97
Macet	597	597	1.608	1.606	1.598	1.584	1.538	1.884	1.846	1.557	1.562	1.480	1.432	1.473	1.381	1.442
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,72%	85,84%	85,95%	90,42%	89,69%	88,74%	88,42%	88,25%	87,05%	85,73%	86,60%	84,49%	84,34%	83,81%	83,75%	86,77%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,38%	3,42%	3,40%	3,78%	3,86%	3,83%	3,67%	3,69%	3,61%	3,08%	3,16%	3,09%	3,11%	3,14%	2,95%	2,74%

Sumber: Bank Indonesia
Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2023								2024							
	I		II		III		IV		I		II		III		IV	
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT (Lbr)	50.215	810	66.535	1.073	67.249	1.085	82.833	1.336	61.532	992	69.283	1.117	69.262	1.117	82.216	1.326
2. NOMINAL (Jt.Rp)	3.278.058	52.872	3.225.906	52.031	3.614.866	58.304	4.167.192	67.213	3.366.996	54.306	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180	3.987.954	64.322

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output <i>gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile food), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebit maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoy (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

